

**PENGELOLAAN PELELANGAN IKAN BERBASIS  
GAMPONG STUDI PADA TPI DI GAMPONG LHOK BUBON,  
KECAMATAN SAMATIGA, KABUPATEN  
ACEH BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan oleh:

M. AL KAUTSAR

NIM : 200404029

**Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**BANDA ACEH**

**2026/1447**

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasih (FDK) Universitas Islam  
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Dakwah Program Studi Pengembangan**

**Masyarakat Islam (PMI)**

**Diajukan Oleh**

**M. AL KAUTSAR**

**NIM : 200404029**

**Disetujui oleh :**

**جامعة الرانيري**

**A R - R A N I R Y**

**Pembimbing 1**

**Pembimbing 2**

  
**Dr. Pasvidah, M. Ag**

**NIP. 197309081998032002**

  
**Marini Kristina Situmeang, M.A, M.Sos**

**NIP. 199111272020121002**

**SKRIPSI**

Telah dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Diajukan Oleh :

**M. AIKAUTSAR**

**NIM. 200404029**

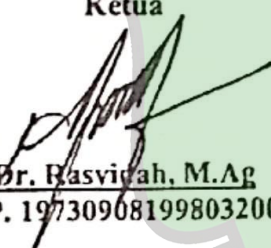
Pada Hari/ Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026

17 Sya'ban 1447 H

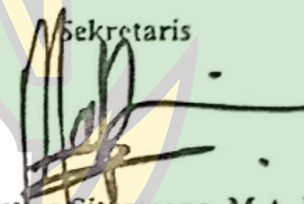
Darussalam Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua

  
**Dr. Basviah, M.Ag**  
NIP. 197309081998032002


Sekretaris

  
**Marini Kristina Situmeang, M.A, M.Sos**  
NIP. 199111272020121002

Anggota I

  
**Ners. Hendra Cipta, S.Kep. M. Si**  
NIP. 197910272006041004

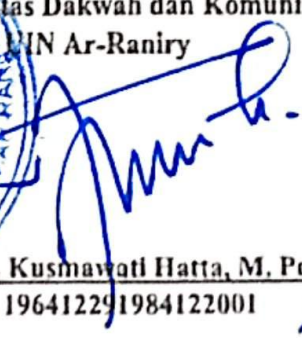
Anggota II

  
**Ismiatul Ramadhian Nur, ST., M. SI.**  
NIP. 199103262025052001



Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry

  
**Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd**  
NIP. 196412291984122001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : M. Al Kautsar

NIM : 200404029

Jenjang : Sarjana Srata Satu (S-1)

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dapat dan disebutkan dalam daftar pustaka. Ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 09 Februari 2026

Yang Menyatakan,

AR-RANIRY

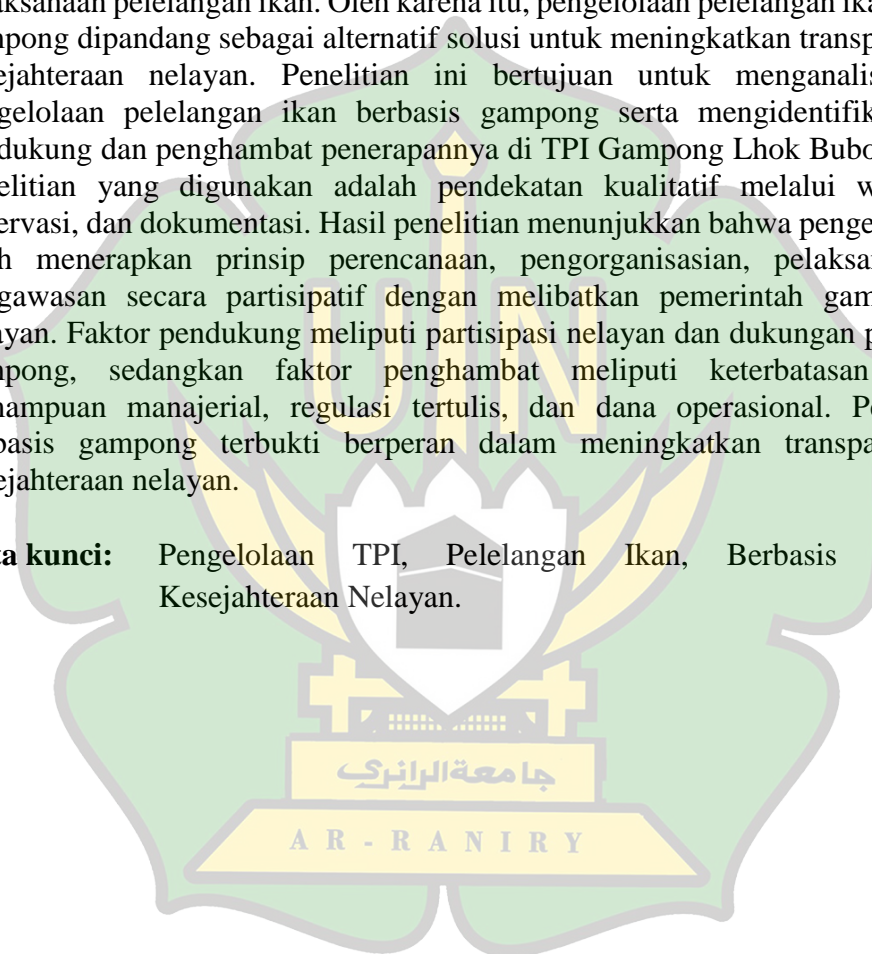


M. Al Kautsar  
Nim. 200404029

## ABSTRAK

Permasalahan utama yang dihadapi nelayan di Gampong Lhok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat adalah belum optimalnya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang masih bersifat tradisional, kurang transparan, serta belum mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Ketimpangan harga ikan, keterbatasan fasilitas, dan lemahnya sistem manajemen menjadi tantangan dalam pelaksanaan pelelangan ikan. Oleh karena itu, pengelolaan pelelangan ikan berbasis gampong dipandang sebagai alternatif solusi untuk meningkatkan transparansi dan kesejahteraan nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan pelelangan ikan berbasis gampong serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapannya di TPI Gampong Lhok Bubon. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TPI telah menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah gampong dan nelayan. Faktor pendukung meliputi partisipasi nelayan dan dukungan pemerintah gampong, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan fasilitas, kemampuan manajerial, regulasi tertulis, dan dana operasional. Pengelolaan berbasis gampong terbukti berperan dalam meningkatkan transparansi dan kesejahteraan nelayan.

**Kata kunci:** Pengelolaan TPI, Pelelangan Ikan, Berbasis Gampong, Kesejahteraan Nelayan.



## ABSTRACT

*The main problem faced by fishermen in Gampong Lhok Bubon, Samatiga District, West Aceh Regency is the suboptimal management of the Fish Auction Place (TPI), which remains traditional, lacks transparency, and has not been able to significantly improve fishermen's welfare. Price disparities, limited facilities, and weak management systems have become major challenges in the implementation of fish auctions. Therefore, a gampong-based fish auction management model is considered an alternative solution to enhance transparency and fishermen's welfare. This study aims to analyze the gampong-based fish auction management system and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation at the TPI of Gampong Lhok Bubon. The research employed a qualitative approach using interviews, observations, and documentation techniques. The results indicate that TPI management has applied management principles including planning, organizing, implementing, and monitoring in a participatory manner involving the gampong government and fishermen. Supporting factors include active fishermen participation and support from the gampong government, while inhibiting factors consist of limited facilities, managerial capacity constraints, the absence of written regulations, and limited operational funds. Overall, the gampong-based management model has contributed to improving transparency and enhancing fishermen's welfare.*

**Keywords:** *fish auction management, fish auction place, village-based management, fishermen's welfare.*



## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Pelelangan Ikan Berbasis Gampong Studi Pada TPI di Gampong Lhok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat”** Shalawat beriring salam penulis panjatkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr Rasyidah, M.Ag dan Ibu Marini Kristina Situmeang, M.A,Sos selaku dosen pembimbing yang senantiasa mendidik, memberikan arahan dan masukan dengan tulus, dan penuh kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof Dr. H. Mujiburrahman M, Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh.
2. Prof Dr. Kusnawati Hatta, M.PD. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Rasyidah,M.Ag., Selaku Ketua jurusan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Dr. Rasyidah, M.Ag. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Marini Kristina Situmeang, M.A.Sos Selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu penulis selama proses mengajar dalam tujuh semester pada perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada cinta pertama dan pintu surga saya ayahanda Desa Harman dan ibunda Elfida Kartik S.pd tercinta, yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan motivasi, selalu mendengar keluh kisah saya pada saat penulisan skripsi ini, selalu mendoakan yang terbaik dan menjadi support system no 1 bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberikan umur panjang dan diberikan kesehatan serta diberikan kemudahan dalam segala urusan dan berada dilindungi Allah SWT amin ya rabbal alamin.
8. Kepada kedua Kakak tercinta saya Lita Deka Putri A.Md. dan Pipi Febriani S.Pd terimakasih telah memberikan arahan dan dukungan selama penulisan skripsi, dan mendoakan yang terbaik.
9. Kepada sahabat seperjuangan leting 2020 Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang saling mendukung dan support satu sama lain, pada saat proses pengerjaan hingga selesai, semoga kedepannya kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain.
10. Dan terakhir untuk semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dari awal hingga akhir penulisan.

Saya menyadari masih banyak terdapat kekurangan serta kelemahan dalam penyusunan maupun dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu saya sangat mengharap kritikan dan saran dari para pembaca, demi kesempurnaan penulisan karya tulis ilmiah ini ke depannya. Demikian semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2026  
Penulis,

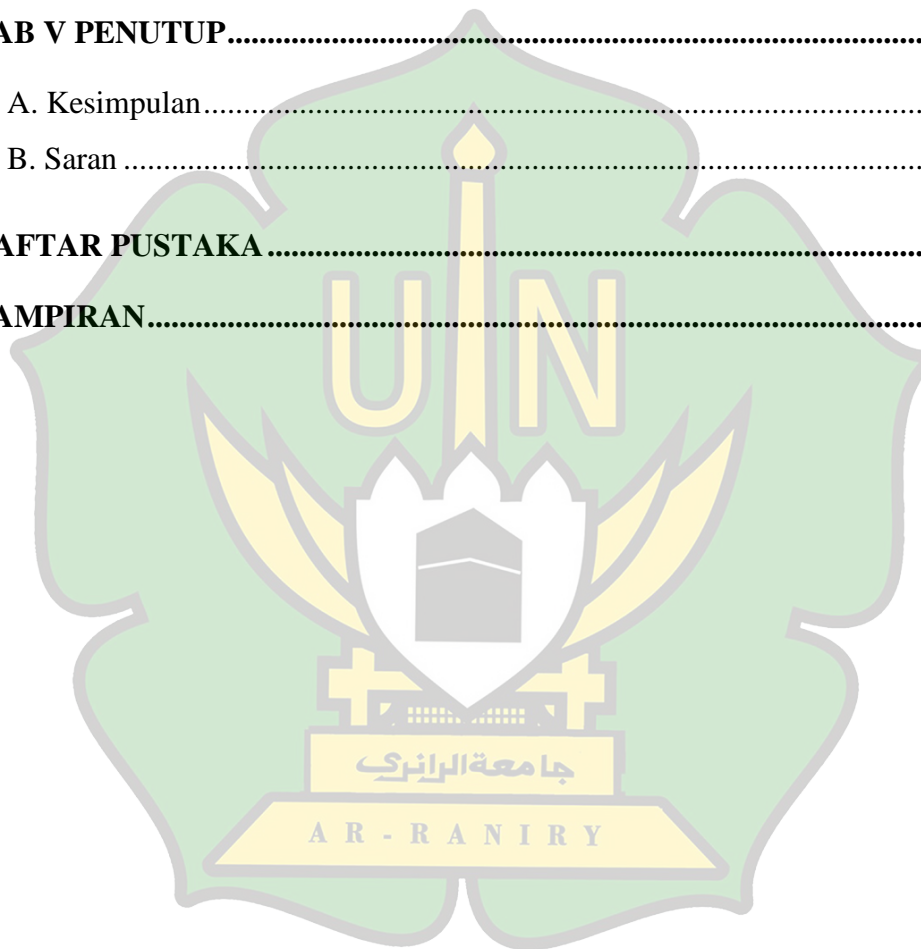
M. Al Kautsar



## DAFTAR ISI

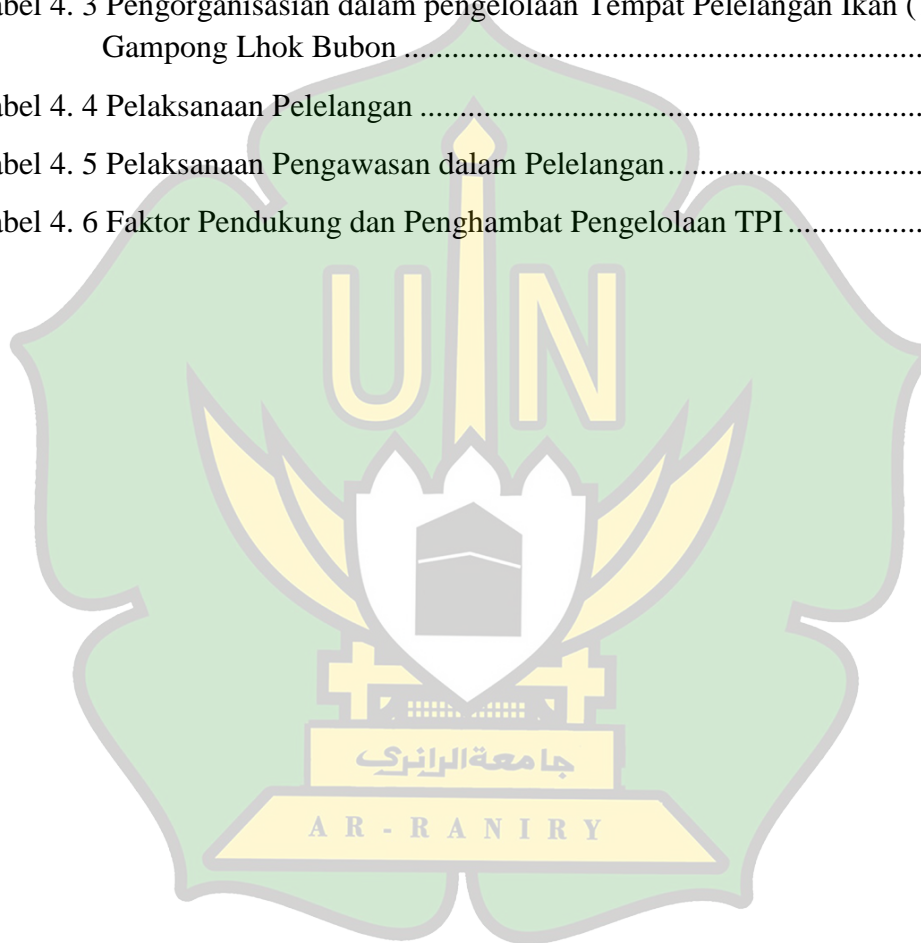
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	6
C. Tujuan penulisan.....	6
D. Manfaat penelitian .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	10
B. Landasan teori.....	15
1. Pengertian Pengelolaan.....	15
2. Konsep Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) .....	17
3. Strategi Pengelolaan TPI untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan ...	18
4. Tempat Pelelangan Ikan.....	20
6. Nelayan.....	22
7. Kesejahteraan.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Metode Penelitian .....	27
B. Jenis Penelitian .....	28
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
D. Instrumen Penelitian .....	29
E. Teknik Pengumpuln Data .....	31
F. Analisis data.....	33

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
B. Hasil Penelitian .....	38
1. Sistem Pengelolaan TPI .....	38
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Pengelolaan Pelelangan Ikan Berbasis Gampong di TPI Gampong Lhok Bubon .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Orisinalitas Penelitian .....	14
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	30
Tabel 4. 1 Proses Perencanaan dalam Pengelolaan TPI.....	42
Tabel 4. 2 Aktor yang Terlibat dalam Perencanaan.....	45
Tabel 4. 3 Pengorganisasian dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Lhok Bubon .....	48
Tabel 4. 4 Pelaksanaan Pelelangan .....	54
Tabel 4. 5 Pelaksanaan Pengawasan dalam Pelelangan.....	58
Tabel 4. 6 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan TPI.....	67



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas dan potensi kelautan yang sangat besar. Sektor perikanan menjadi salah satu pilar utama dalam menopang perekonomian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Nelayan sebagai aktor utama dalam sektor ini memiliki peran penting dalam menyediakan hasil perikanan yang menjadi sumber pangan dan pendapatan. Namun, dalam praktiknya, kesejahteraan nelayan masih menjadi tantangan besar akibat berbagai faktor, termasuk akses pasar yang terbatas, fluktuasi harga ikan, serta minimnya infrastruktur pendukung yang memadai.<sup>1</sup>

Di balik potensi besar tersebut, nelayan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakpastian harga ikan, minimnya fasilitas pelelangan, serta ketergantungan terhadap tengkulak yang kerap memonopoli pasar. Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berbasis gampong, yang memberikan kendali lebih besar kepada masyarakat lokal dalam mengatur mekanisme pelelangan ikan secara adil dan transparan.<sup>2</sup>

Salah satu permasalahan utama dalam sistem pelelangan ikan di berbagai daerah adalah masih adanya ketidakseimbangan antara nelayan dan pembeli dalam menentukan harga jual ikan. Fenomena yang sering terjadi adalah adanya

---

<sup>1</sup>Juliana, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan ( Studi Kasus : Kelurahan Bagan Deli Seberang, Kecamatan Medan Belawak, Kota Medan).

<sup>2</sup>James Abrahamsz, dkk. (2018). *Strategi Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru*. Jakarta: Lembaga Penelitian Perikanan Nasional.

permainan harga oleh pihak perantara (tengkulak) yang menyebabkan nelayan tidak memperoleh keuntungan maksimal dari hasil tangkapannya. Selain itu, infrastruktur TPI yang tidak memadai, seperti minimnya fasilitas penyimpanan ikan, kurangnya sistem pencatatan transaksi yang transparan, serta keterbatasan akses pasar, semakin memperburuk kondisi nelayan. Ketidakefektifan dalam pengelolaan pelelangan ikan ini sering kali berdampak pada rendahnya pendapatan nelayan dan lambatnya peningkatan kesejahteraan mereka.<sup>3</sup>

Pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam hal ini, searah dengan penerapan otonomi daerah yang berada di Indonesia, maka kewenangan pengelolaan sumber daya alam daerah pesisir diserahkan kepada daerah sepenuhnya. Berdasarkan UUD 1945, daerah diberikan hak sepenuhnya dalam mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya hal ini telah disampaikan pada pasal 18 A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa persoalan yang terdiri dari hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan di atur oleh pemerintah daerah yang harus dilakukan secara adil dan selaras sesuai yang telah tertulis di Undang-Undang.<sup>4</sup>

Angka kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada kalangan nelayan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang signifikan dengan data menunjukkan ada sekitaran 7,87 juta masyarakat Indonesia hidup dalam angka

---

<sup>3</sup>Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Statistik Perikanan Tangkap Nasional 2023, (Jakarta: KKP, 2023).

<sup>4</sup>Hesen, potret masyarakat pesisir dalam mengelola hasil laut (studi di desa Tanjung Labu, kecamatan Leper Pongok, kabupaten Bangka Selatan).

kemiskinan, dan dari jumlah tersebut 2,2 juta jiwa adalah nelayan yang sangat miskin.<sup>5</sup> Provinsi Aceh memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar dengan garis pantai sepanjang 1.660 Km dan luas perairan laut mencapai 295.370km. Produksi ikan di Aceh selama lima tahun terakhir rata-rata mencapai 260 ton pertahun. Masyarakat pesisir aceh, yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, menghadapi tantangan kesejahteraan meskipun produksi ikan melimpah. Kesejahteraan nelayan diukur menggunakan nilai tukar ikan, yang dipengaruhi oleh beberapa factor moneter seperti indeks konsumsi rumah tangga nelayan tangkap, harga bahan bakar solar, dan indeks pembangunan manusia.<sup>6</sup>

Di Aceh, sektor perikanan menjadi salah satu sumber penghidupan utama bagi masyarakat pesisir, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan jumlah nelayan yang signifikan. Salah satu wilayah yang memiliki potensi perikanan besar adalah Gampong Lhok Bubon, Kecamatan Samatiga. Namun, meskipun memiliki potensi perikanan yang tinggi, kesejahteraan nelayan di daerah ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam sistem pelelangan ikan yang belum terkelola secara optimal. TPI yang ada di wilayah ini belum sepenuhnya mampu menjamin kesejahteraan nelayan, karena masih banyak permasalahan dalam sistem manajemen, infrastruktur, serta kebijakan pelelangan yang belum berjalan dengan baik.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan di Gampong Lhok Bubon adalah penggunaan sistem

---

<sup>5</sup> Basri, M. dan Firdaus, M., "Analisis Efisiensi dan Kesejahteraan Nelayan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pesisir*, Vol. 7, No. 1, 2022

<sup>6</sup> Faris Mubarak, dkk, *Kajian Moneter Terhadap Nilai Tukar Nelayan Tangkap diprovinsi Aceh*, jurnal ilmiah ekonomi Terpadu (Jimetera) vol 3 No. 1, 2023, hal 69.

pelelangan ikan yang masih bersifat tradisional dan belum berbasis teknologi. Sistem ini cenderung tidak transparan karena harga ikan lebih sering ditentukan secara sepihak oleh tengkulak atau pedagang besar tanpa adanya mekanisme negosiasi yang adil dari pihak nelayan. Misalnya, berdasarkan data dari TPI setempat tahun 2023, harga ikan tongkol hanya dihargai Rp8.000 per kilogram, sementara harga pasar dapat mencapai Rp12.000–Rp14.000 per kilogram. Ketimpangan harga ini menyebabkan nelayan tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dari hasil tangkapannya. Sumber ketimpangan ini dapat dilacak dari laporan dokumentasi internal TPI serta hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhaliza (2022) yang juga mencatat bahwa sistem pelelangan konvensional memperburuk daya tawar nelayan dalam menentukan harga jual ikan mereka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, konsep pengelolaan pelelangan ikan berbasis gampong menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat diterapkan. Model ini memungkinkan masyarakat lokal, khususnya nelayan dan pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI), untuk memiliki kontrol lebih besar dalam menentukan harga ikan serta mengelola pelelangan secara lebih profesional. Menurut laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat (2023), beberapa gampong di wilayah pesisir mulai menerapkan sistem pelelangan berbasis masyarakat dengan pendekatan kearifan lokal, termasuk Gampong Lhok Bubon. Pendekatan berbasis gampong ini menekankan pada kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola hasil perikanan mereka, baik dari segi distribusi, pemasaran, hingga penentuan harga. Salah satu bentuk praktik di Gampong Lhok Bubon adalah pembentukan tim lelang gampong yang terdiri dari tokoh masyarakat, perwakilan nelayan, dan

perangkat desa yang bertugas memastikan proses pelelangan berlangsung transparan dan harga jual ikan menguntungkan bagi nelayan. Dengan sistem ini, diharapkan pelelangan ikan dapat lebih transparan, efisien, dan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi nelayan.

Pengelolaan pelelangan ikan berbasis gampong juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, koperasi nelayan, serta lembaga keuangan yang dapat membantu dalam pengembangan modal dan teknologi. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan regulasi yang mendukung transparansi dan efisiensi dalam sistem pelelangan ikan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pelelangan, seperti sistem lelang berbasis aplikasi atau platform online, juga dapat menjadi solusi untuk memperluas akses pasar bagi nelayan, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada pembeli lokal, tetapi juga dapat menjangkau pembeli dari luar daerah. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam laporan tahunannya (KKP, 2023), digitalisasi pelelangan ikan melalui e-lelang telah diterapkan di beberapa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk perikanan serta memperpendek rantai distribusi dari nelayan ke konsumen.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Pelelangan Ikan Berbasis Gampong: Studi pada TPI di Gampong Lhok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat”.

---

<sup>7</sup>Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Kinerja KKP 2023*. Jakarta: KKP.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana sistem pengelolaan pelelangan ikan berbasis gampong di TPI Gampong Lhok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pengelolaan pelelangan ikan berbasis gampong di TPI Gampong Lhok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat?

## **C. Tujuan penulisan**

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan pelelangan ikan berbasis gampong di TPI Gampong Lhok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pengelolaan pelelangan ikan berbasis gampong di TPI Gampong Lhok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat.

## **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen sumber daya perikanan dan ekonomi berbasis komunitas. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai konsep pengelolaan pelelangan ikan berbasis gampong, termasuk bagaimana strategi pengelolaan yang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi,

peneliti, dan mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian tentang model pengelolaan pelelangan ikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## 2. Manfaat praktis

Diharapkan kajian ini dapat memberikan masukan penting bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi dan pengetahuan tentang potensi TPI untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai bahan literatur untuk penelitian selanjutnya.

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk mendapatkan kesamaan konsepsi dari pembaca terhadap pengertian yang terdapat dalam judul penelitian ini, perlu untuk menjelaskan beberapa pengertian sebagai berikut :

### 1. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan serangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, pengelolaan merujuk pada strategi dan mekanisme yang diterapkan dalam mengatur Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berbasis gampong agar dapat beroperasi secara efektif dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.<sup>8</sup>

### 2. Pelelangan Ikan

Pelelangan ikan adalah sistem penjualan ikan hasil tangkapan nelayan melalui mekanisme penawaran harga terbuka di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Tujuan

---

<sup>8</sup>Dadang Mulyadi, *Ekonomi Perikanan: Konsep dan Aplikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 44.

dari pelelangan ini adalah untuk menciptakan sistem jual beli yang transparan, adil, dan menguntungkan bagi nelayan serta pembeli. Dalam penelitian ini, pelelangan ikan merujuk pada praktik pelelangan yang dilakukan di Gampong Lhok Bubon sebagai bagian dari sistem ekonomi perikanan di daerah tersebut.

9

### 3. Berbasis Gampong

Berbasis gampong berarti suatu sistem atau kebijakan yang diterapkan dengan menekankan pada peran dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaannya. Dalam penelitian ini, berbasis gampong mengacu pada konsep pelelangan ikan yang dikelola oleh masyarakat desa (gampong) secara mandiri dengan dukungan pemerintah daerah, guna meningkatkan kesejahteraan nelayan dan efektivitas pasar ikan.<sup>10</sup>

### 4. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat transaksi jual beli ikan hasil tangkapan nelayan melalui sistem lelang. TPI bertujuan untuk menciptakan harga yang transparan, meningkatkan daya saing nelayan, dan mengatur distribusi hasil tangkapan secara lebih terorganisir. Dalam penelitian ini, TPI yang menjadi fokus studi adalah yang berlokasi di Gampong Lhok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2019), 4.

<sup>10</sup>Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*, (Jakarta: Kemendagri, 2014), Pasal 3.

<sup>11</sup>Dadang Mulyadi, *Ekonomi Perikanan: Konsep dan Aplikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 60.

## 5. Nelayan

Nelayan adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadikan kegiatan menangkap ikan sebagai mata pencaharian utama. Kondisi ekonomi masyarakat sangat terbatas, dikarenakan masyarakat setempat hanya mengandalkan pekerjaan nelayan sebagai mata pencarian.<sup>12</sup> Mereka umumnya bergantung pada hasil tangkapan laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam penelitian ini, nelayan yang menjadi objek studi adalah mereka yang bergantung pada pelelangan ikan di TPI Gampong Lhok Bubon sebagai sumber utama pendapatan mereka.<sup>13</sup>

## 6. Desa Lhok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat

Desa Lhok Bubon adalah salah satu desa di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan. Desa ini dikenal sebagai wilayah dengan aktivitas pelelangan ikan yang cukup aktif, sehingga menjadi fokus utama dalam penelitian ini terkait strategi pengelolaan TPI untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Rasyidah, M.Ag Dkk. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Budidaya Tiram Gampong Tiban Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. *Al-Ijtima'iyyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2)2018,70-71.

<sup>13</sup>Yayan Sopyan, *Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 48..

<sup>14</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat. (2023). *Kecamatan Samatiga dalam Angka 2023*. Meulaboh: BPS Aceh Barat.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, diperlukan telaah kepustakaan dengan mengkaji hasil penelitian terdahulu. Kajian ini berfungsi sebagai acuan sekaligus pembeda, sehingga penelitian ini memiliki keunikan dan kontribusi yang jelas.

Penelitian yang dilakukan oleh Aziz, Abdul; Rizwan; Aprilia, Ratna M. (2017) Aziz, Abdul; Rizwan; Aprilia, Ratna M. (2017) ini berjudul “Tingkat Efisiensi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo Banda Aceh.” merupakan salah satu studi penting dalam menganalisis performa pengelolaan TPI di kawasan pesisir. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat efisiensi operasional yang dicapai oleh TPI Lampulo, yang merupakan salah satu pusat pelelangan terbesar di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPI ini memiliki tingkat pemanfaatan fasilitas mencapai 97%, yang menandakan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia telah dimaksimalkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Keberhasilan ini dinilai berasal dari sinergi antara manajemen yang profesional, keterlibatan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur, serta partisipasi aktif nelayan dalam proses pelelangan. Relevansinya dengan pengelolaan TPI berbasis gampong di Lhok Bubon terletak pada pentingnya membangun sistem yang efisien dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Meski skala operasional di gampong lebih kecil, prinsip efisiensi yang sama dapat diterapkan, misalnya dengan

mengatur jam pelelangan yang terorganisir, penggunaan fasilitas secara bergilir, serta melibatkan tokoh masyarakat dalam pengawasan kegiatan pelelangan.<sup>15</sup>

Nisa, Khairun (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*Peran Kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terhadap Penjualan Nelayan (Studi Kasus: Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai)*”, Khairun Nisa mengkaji secara mendalam bagaimana lembaga TPI dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi para nelayan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan TPI tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli hasil laut, tetapi juga sebagai sarana penguatan ekonomi komunitas melalui sistem manajemen yang terstruktur. Dalam studi ini ditemukan bahwa TPI yang memiliki struktur kelembagaan yang kuat mampu menciptakan harga yang stabil, transparansi dalam transaksi, serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Implikasi penting dari penelitian ini terhadap pengelolaan TPI berbasis gampong adalah bahwa gampong perlu membentuk kelembagaan lokal baik dalam bentuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) atau tim pengelola khusus yang bertugas mengatur, mengawasi, dan mengembangkan operasional TPI secara kolektif. Selain itu, keberadaan lembaga ini juga dapat berfungsi sebagai jembatan antara nelayan dengan pihak pembeli, pemilik modal, dan instansi pemerintah.<sup>16</sup>

Sadadang, Yursita Sahae; Lengkong, Florence; Tampongangoy, Deisy (2020) dengan penelitian berjudul “*Manajemen Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di*

---

<sup>15</sup> Aziz, A., Rizwan, & Aprilia, R. M. (2017). *Tingkat efisiensi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian, 2(4), 227–234.

<sup>16</sup>Nisa, K. (2020). *Peran kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terhadap penjualan nelayan (Studi kasus: Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara.

*Kelurahan Tumumpa Dua Kota Manado*” merupakan studi yang sangat kaya secara teoritis karena membahas fungsi-fungsi manajemen secara komprehensif. Peneliti menggunakan teori manajemen klasik perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk menganalisis kelemahan dan kekuatan sistem pelelangan di Manado. Hasil studi ini menunjukkan bahwa banyak TPI mengalami stagnasi bukan karena kurangnya hasil tangkapan, melainkan karena lemahnya perencanaan strategis, rendahnya koordinasi antarpelaku, serta minimnya evaluasi terhadap proses pelelangan. Dalam Gampong Lhok Bubon, temuan ini bisa menjadi pelajaran penting. Pemerintah gampong perlu menetapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk operasional TPI, termasuk jadwal pelelangan, sistem distribusi hasil lelang, hingga pengaturan tenaga kerja. Pengawasan perlu melibatkan unsur masyarakat agar proses pelelangan berjalan transparan dan terhindar dari kecurangan yang merugikan nelayan kecil. Penerapan prinsip manajerial yang sederhana namun konsisten dapat menjamin keberlanjutan TPI sebagai lembaga ekonomi berbasis komunitas.<sup>17</sup>

Penelitian oleh Shouful Wizan (2021) yang berjudul “*Analisis Peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)*” menawarkan pendekatan yang sangat relevan khususnya dalam konteks sosial-religius seperti di Aceh. Dalam penelitiannya, Shouful menekankan pentingnya pengelolaan TPI

---

<sup>17</sup> Sadadang, Y. S., Lengkong, F., & Tampongangoy, D. (2020). *Manajemen Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Tumumpa Dua Kota Manado*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(1), 457–466

yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, antara lain keadilan, kejujuran, keterbukaan informasi, dan larangan terhadap praktik monopoli atau penimbunan (ihtikar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika TPI dikelola dengan prinsip-prinsip syariah, maka tidak hanya meningkatkan pendapatan nelayan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, memperkecil kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap sistem yang ada. Bagi Gampong Lhok Bubon, penerapan nilai-nilai ini sangat mungkin dilakukan, mengingat masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengadopsi sistem pelelangan yang berlandaskan keadilan dan nilai-nilai keislaman, TPI gampong tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga pusat pembelajaran sosial dan spiritual.<sup>18</sup>

Penelitian oleh Fadli Febryanto, Mohamad Sam'un, dan Fatimah Azzahra (2024) yang berjudul "*Efektivitas Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Jawa Barat*" Hasil penelitian menunjukkan keseluruhan nilai rasio efektivitas yang diukur dengan formula Mahmudi pada periode tahun 2020-2022, Untuk efektivitas aktivitas perahu, retribusi pelelangan, produksi ikan dan penerimaan hasil lelang berada pada kriteria "Kurang Efektif". Sedangkan efektivitas operasional TPI dan sistem pelaporan monitoring mencapai tingkat kriteria "Sangat Efektif" dan efektivitas harga ikan di TPI Sungaibuntu mencapai tingkat kriteria "Efektif". Untuk efektivitas yang diukur menurut persepsi nelayan, variabel TPI sebagai pelayanan

---

<sup>18</sup> Wizan, S. (2021). *Analisis peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dalam perspektif ekonomi Islam (Studi pada masyarakat Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung.

dan fasilitas memperoleh kriteria “Kurang Efektif”. Sedangkan TPI sebagai fasilitas memperoleh kriteria “Efektif”. Terdapat perbedaan pada pendapatan nelayan yang menjual ikan di TPI dengan nelayan yang menjual ikan di luar TPI.<sup>19</sup>

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan mengenai penelitian yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya dapat di jelaskan melalui table berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi/Tahun	Perbedaan	Relevansi	Fokus Peneliti
1.	Aziz, Abdul; Rizwan; Aprilia, Ratna M.	Tingkat Efisiensi TPI Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo Banda Aceh (2017)	Penelitian ini berfokus pada efisiensi pemanfaatan fasilitas TPI berskala besar di pelabuhan, bukan pada TPI desa atau gampong.	Relevan untuk dijadikan acuan optimalisasi pengelolaan fasilitas TPI di tingkat gampong agar lebih efisien dan terorganisir seperti pelabuhan besar.	Menganalisis tingkat efisiensi pemanfaatan TPI sebagai pusat kegiatan ekonomi nelayan di pelabuhan perikanan.
2.	Amri; Rahman	Pengelolaan Pelelangan Ikan Berbasis Masyarakat di Gampong Paya Basi, Aceh Besar (2020)	Pendekatan pengelolaan yang berbasis partisipatif masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal.	Membahas secara langsung pengelolaan pelelangan ikan berbasis masyarakat di tingkat gampong.	Menganalisis pengelolaan pelelangan ikan berbasis masyarakat di Gampong Paya Basi.
3.	Nisa, Khairun	Peran Kelembagaan TPI terhadap Penjualan Nelayan di Serdang Bedagai (2020)	Lokasi penelitian di Sumatera Utara, dengan fokus pada hubungan kelembagaan formal terhadap kesejahteraan nelayan, tidak menyoar pengelolaan berbasis	Relevan untuk penguatan kelembagaan lokal (seperti BUMG atau lembaga adat) dalam pengelolaan TPI gampong secara kolektif dan berkelanjutan.	Mengkaji pengaruh struktur kelembagaan TPI terhadap peningkatan pendapatan dan sistem penjualan hasil tangkapan nelayan.

<sup>19</sup>Febryanto, Fadli et al. 2024. Efektivitas Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Jawa Barat. Paspalum : Jurnal Ilmiah Pertanian, 12(2):216-229.

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi/Tahun	Perbedaan	Relevansi	Fokus Peneliti
			masyarakat adat/gampong.		
4.	Sadadang, Yursita; Lengkong, Florence; Tampongangoy, Deisy	Manajemen TPI di Kelurahan Tumumpa Dua, Kota Manado (2020)	Pendekatan manajemen formal berbasis kelurahan kota, bukan konteks sosial budaya gampong.	Relevan untuk melihat penerapan empat fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan) dalam pengelolaan TPI gampong.	Menguraikan peran fungsi-fungsi manajerial dalam keberhasilan operasional TPI di kawasan pesisir perkotaan.
5.	Wizan, Shouful	Peran TPI dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pesawaran (2021)	Pendekatan berbasis ekonomi Islam dalam konteks masyarakat di luar Aceh.	Sangat relevan untuk diterapkan di Aceh karena pendekatan nilai-nilai Islam sejalan dengan karakteristik sosial masyarakat dan regulasi lokal berbasis syariat.	Menganalisis pengelolaan TPI dengan prinsip keadilan, transparansi, dan nilai-nilai Islam dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.

## B. Landasan teori

### 1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari istilah "management", yang mencakup berbagai aktivitas seperti mengatur, mengelola, melaksanakan, mengendalikan, serta memperlakukan sesuatu dengan cara tertentu. Pengelolaan

dapat dipahami sebagai suatu bentuk interaksi atau pendekatan yang bertujuan untuk mengawasi dan menerapkan metode tertentu dalam suatu kegiatan. Selain itu, pengelolaan juga melibatkan pengumpulan sumber daya manusia, proses perencanaan, serta langkah-langkah strategis yang membantu dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, pengelolaan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian suatu proses guna mencapai hasil yang optimal..

Menurut Suharsimi, pengelolaan adalah substantive dari mengelola sedangkan mengelola berarti suatu kegiatan dari pengumpulan informasi, mengatur, menyusun, melaksanakan, mengamati, dan memulai. Dijelaskan kemudian bahwa pengelolaan dapat dihasilkan suatu dan menjadi tempat kemajuan dan perbaikan lebih lanjut dalam pengelolaan.<sup>20</sup>

Nugroho menyatakan pengelolaan adalah istilah yang digunakan dalam ilmu manajemen. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata "kelola" (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.<sup>21</sup> Sementara itu, menurut Syamsu, pengelolaan menitikberatkan pada fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan tidak hanya berkaitan

---

<sup>20</sup>Nugroho, B. (2020). *Manajemen: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.

<sup>21</sup>Wahyudi Alamsyah, pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI) dalam perspekti ekonomi Islam dan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Timur Kota Palopo

dengan perencanaan dan pengorganisasian, tetapi juga dengan pelaksanaan dan pengendalian untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara optimal.

22

## 2. Konsep Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan bagian dari sistem manajemen perikanan yang bertujuan untuk menciptakan mekanisme pemasaran ikan yang lebih efisien, meningkatkan pendapatan nelayan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Konsep manajemen menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa TPI dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi nelayan serta masyarakat sekitar.<sup>23</sup>

Manajemen dalam konteks TPI merujuk pada proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap aktivitas pelelangan ikan agar berjalan efektif dan efisien. Konsep ini mengacu pada prinsip dasar manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry (2009), yang mencakup empat fungsi utama :<sup>24</sup>

- 1) Perencanaan (*Planning*) meliputi :
  - a) Menentukan tujuan dan strategi dalam pengelolaan TPI, termasuk peningkatan fasilitas, sistem lelang yang transparan, dan distribusi hasil pelelangan.
  - b) Merancang kebijakan harga ikan yang kompetitif agar memberikan keuntungan bagi nelayan.

---

<sup>22</sup>Syamsu. (2022). *Manajemen Pendidikan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>23</sup>Gitosudarmo, Indriyo & Sudito, I. (2000), *Manajemen Strategik*, Yogyakarta: BPFE.

<sup>24</sup>George R. Terry (2009), *Principles of Management*, McGraw-Hill Education.

- c) Menyusun sistem pengelolaan keuangan dan iuran untuk mendukung operasional TPI.
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*)
- a) Menyusun struktur organisasi pengelola TPI yang melibatkan pemerintah daerah, koperasi nelayan, dan stakeholder terkait.
  - b) Mendistribusikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing pihak, seperti petugas pelelangan, pencatat transaksi, serta pengawas operasional.
- 3) Pelaksanaan (*Actuating*)
- a) Melaksanakan sistem pelelangan ikan sesuai dengan mekanisme yang telah dirancang.
  - b) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, seperti sistem informasi pelelangan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi.
  - c) Melakukan koordinasi dengan lembaga perikanan dan instansi terkait untuk mendukung keberlanjutan operasional TPI.
- 4) Pengawasan (*Controlling*)
- a) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelelangan, termasuk memantau harga ikan, kondisi fasilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi perikanan.
  - b) Menerapkan mekanisme audit dan transparansi untuk menghindari praktik kecurangan dalam pelelangan ikan.
  - c) Menyediakan wadah bagi nelayan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait pengelolaan TPI.

### **3. Strategi Pengelolaan TPI untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, strategi pengelolaan TPI harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan keberlanjutan sumber daya. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain<sup>25</sup>:

- 1) Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas TPI
  - a) Membangun atau memperbaiki fasilitas pelelangan, seperti tempat penyimpanan ikan yang higienis, sistem pendinginan, dan sarana transportasi.
  - b) Menyediakan sistem pencatatan harga ikan secara digital agar lebih transparan dan mudah diakses oleh nelayan serta pembeli.
- 2) Optimalisasi Sistem Pelelangan
  - a) Mengadopsi sistem pelelangan yang lebih kompetitif dengan model *open auction* (lelang terbuka) untuk mencegah adanya monopoli harga oleh tengkulak.
  - b) Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akses pasar bagi nelayan, misalnya melalui platform online yang menghubungkan nelayan langsung dengan pembeli.
- 3) Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Nelayan
  - a) Melibatkan koperasi nelayan sebagai pengelola utama TPI agar nelayan memiliki kontrol lebih besar dalam menentukan harga dan mekanisme penjualan.

---

<sup>25</sup>Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (2019), Pedoman Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

- b) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan kepada pengelola TPI mengenai sistem administrasi, manajemen keuangan, dan pemasaran ikan.
- 4) Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*)
- a) Memastikan pengelolaan TPI dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga menghindari praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
  - b) Menerapkan regulasi yang mendukung kesejahteraan nelayan, seperti kebijakan subsidi bahan bakar, bantuan modal usaha, serta perlindungan hukum bagi nelayan kecil.
- 5) Diversifikasi Usaha untuk Meningkatkan Pendapatan Nelayan
- a) Mengembangkan usaha turunan berbasis perikanan, seperti pengolahan ikan, industri perikanan skala kecil, serta ekowisata berbasis perikanan.
  - b) Menjalani kerja sama dengan pihak swasta atau investor dalam rangka membuka peluang ekspor hasil laut dari TPI.

#### **4. Tempat Pelelangan Ikan**

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan suatu lokasi yang disediakan secara resmi, baik oleh pemerintah maupun lembaga terkait, sebagai pusat kegiatan jual beli ikan hasil tangkapan nelayan yang dilakukan secara terbuka dan terorganisir melalui sistem lelang. TPI memiliki peran strategis dalam menjaga kestabilan harga ikan, meningkatkan transparansi transaksi, serta melindungi kepentingan nelayan dari praktik tengkulak yang merugikan. Menurut Saragih TPI

adalah tempat yang disediakan untuk menjual ikan hasil tangkapan secara lelang dengan sistem yang adil dan transparan guna memberikan perlindungan harga yang layak bagi nelayan<sup>26</sup>. Menurut Wahid (2023), TPI adalah pasar yang biasanya terletak di pelabuhan atau pangkalan tempat ikan didaratkan, di mana hasil ikan dilelang atau dijual secara langsung. Fitur utama TPI meliputi kegiatan pemasaran yang efektif melalui sistem lelang, memfasilitasi pengembangan kualitas ikan hasil tangkapan nelayan, serta menyediakan data statistik yang berguna untuk perencanaan dan pengembangan sektor perikanan<sup>27</sup>.

Dampak dari tidak tersedianya infrastruktur dan kualitasnya yang rendah menyebabkan laju tingkat ekonomi menjadi melambat atau buruk yang juga akan berimbas pada tingkat sosial masyarakat itu sendiri. Pembangunan infrastruktur yang baik berupa transportasi (jalan), jaringan listrik, instalasi listrik dan persampahan sangatlah penting dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu wilayah.<sup>28</sup>

Keuntungan dari pelelangan ikan terletak pada kemampuannya memberikan harga tunai yang kompetitif bagi nelayan sekaligus menjaga agar konsumen tidak terbebani oleh harga tinggi. Sistem ini mengurangi dominasi hubungan monopolistik dengan nelayan, karena harga ditentukan secara transparan melalui mekanisme pasar terbuka. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) memberikan keuntungan

---

<sup>26</sup> Saragih, B. (2001). *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

<sup>27</sup> Wahid, H. (2023). *Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pesisir Pantai Sebagai Penguatan Ekonomi Lokal di Kabupaten Luwu Timur*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 17(1), 45–58.

<sup>28</sup>Wita dwi astutu wahid, Dampak keberadaan tempat pelelangan ikan (TPI) Terhadap pembangunan infrastruktur dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di kelurahan benteng kecamatan ujung bulu kabupaten bulukumba

tambahan bagi nelayan dengan menyediakan lokasi yang mudah diakses untuk menjual hasil tangkapan mereka, sementara pembeli dapat memperoleh ikan segar dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan pasar tradisional.<sup>29</sup>

## 6. Nelayan

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya bermukim dipinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya (Imron, 2003;68). Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan. Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jarring, menyangkut alat-alat perlengkapan ke dalam perahu ataupun kapal tidak dimasukan sebagai nelayan, tetapi ahli mesin dan juru masak yang bekerja diatas kapal penangkapan dikatakan sebagai nelayan. Walaupun mereka secara langsung melakukan penangkapan. Berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerja operasi penangkapan.

1. Nelayan subsiten, yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
2. Nelayan asli, yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktifitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.

---

<sup>29</sup>Wahid Hamdi, Potensi Tempat Pelelangan Ikan Dala M Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Nelayan Kelurahan Ponjalae Kota Palopo

3. Nelayan rekreasi, yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau olah raga.
4. Nelayan komersial, yaitu mereka yang menangkap ikan tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestic maupun pasar ekspor. Kelompok nelayan ini dibagikan dua, yaitu nelayan skala kecil dan nelayan skala besar.

jadi disimpulkan semua nelayan yang mencari ikan tidak untuk dijual dan dipasarkan ada beberapa sebagian nelayan mencari ikan untuk kebutuhan sendiri, ada sebagian hanya untuk kesenangan akan hobinya dalam mencari ikan. akan tetapi nelayan benar-benar dalam memasarkan ikannya yaitu nelayan komersial yaitu nelayan yang mencari ikan untuk dijual.<sup>30</sup>

## **7. Kesejahteraan**

Kesejahteraan adalah kondisi di mana individu atau kelompok mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka secara material, spiritual, dan sosial, sehingga dapat hidup layak dan mengembangkan diri sesuai dengan potensi mereka. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai "kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya."<sup>31</sup>

Dalam perspektif ekonomi, kesejahteraan sering diukur melalui indikator pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat. Namun, kesejahteraan tidak hanya

---

<sup>30</sup>Susanti, Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima

<sup>31</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

terbatas pada aspek ekonomi; aspek non-ekonomi seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan sosial juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan suatu komunitas. Misalnya, menurut Imron, indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat meliputi: (1) adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif; (2) adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan (3) adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan.<sup>32</sup>

Selain itu, kesejahteraan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, umur, kepemilikan aset, dan tabungan. Faktor eksternal seperti kemudahan akses ke lembaga keuangan, bantuan pemerintah, dan fasilitas transportasi juga berkontribusi signifikan terhadap tingkat kesejahteraan.<sup>33</sup>

Dalam konteks sosial, kesejahteraan mencakup rasa aman, kesusilaan, dan ketentraman diri, yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial mereka dengan sebaik-baiknya. Kesejahteraan sosial juga dapat didefinisikan sebagai "suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman diri, setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi." Secara keseluruhan, kesejahteraan merupakan konsep multidimensional yang mencakup

---

<sup>32</sup>Imron, Ali. (2021). Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang dalam Menghadapi Perubahan Iklim. *Riptek*, 6(1), 27–37.

<sup>33</sup>Suharto, Edi. (2022). *Paradigma Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

berbagai aspek kehidupan manusia, baik material maupun non-material, yang saling berinteraksi untuk menciptakan kondisi hidup yang layak dan memadai bagi individu dan masyarakat.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup>Susanti, Manajemen Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Di Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan dan mengolah data, sehingga dapat memecahkan masalah penelitian. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia secara mendalam. Metode ini berfokus pada pengamatan yang mendalam, sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif.<sup>35</sup>

Penelitian ini berfokus pada Strategi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Desa Lhok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mempelajari berbagai masalah sosial dan situasi masyarakat, termasuk proses pengelolaan, aktivitas, serta fenomena yang sedang berlangsung beserta pengaruhnya. Dalam pendekatan kualitatif, pengumpulan data tidak bergantung pada teori tertentu, melainkan diarahkan oleh fakta-fakta yang ditemukan selama proses penelitian di lapangan. Data yang diperoleh dianalisis untuk membangun hipotesis atau teori berdasarkan realitas di lapangan.

---

<sup>35</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

Pendekatan ini relevan untuk mengkaji masalah sosial dan manusia secara interdisipliner dengan metode naturalistik, multimethod, dan interpretatif. Penelitian ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap masalah sosial berdasarkan realitas dan kondisi alami, serta bertujuan menyusun teori atau hipotesis melalui fakta-fakta yang terungkap dalam penelitian kualitatif.<sup>36</sup>

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang ada dalam sosial, budaya, dan perilaku manusia.<sup>37</sup> Adapun dalam penelitian ini fenomena yang difokuskan berkaitan dengan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan dampaknya terhadap kesejahteraan nelayan di Desa Lhok Bubon. Pendekatan ini memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena yang sedang terjadi, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses pengelolaan TPI dan peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.

## **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lhok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Lokasi ini dipilih karena merupakan daerah yang memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan oleh para nelayan untuk menjual hasil tangkapan mereka. Peneliti tertarik untuk

---

<sup>36</sup>Khusnul Khotima, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Studi Kasus TPI Desa Muara Gading Mas, Lampung Timur).

<sup>37</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 15.

mengkaji bagaimana pengelolaan TPI di desa ini dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan, mengingat adanya permasalahan terkait fasilitas dan pengelolaan yang belum optimal.

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada Februari 2025 hingga penelitian ini selesai. Waktu ini dipilih untuk memberikan kesempatan yang cukup untuk mengumpulkan data melalui observasi lapangan, wawancara dengan informan kunci, serta analisis dokumentasi yang ada.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian dalam studi ini terdiri dari beberapa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan akurat, yaitu:

##### **1. Wawancara**

Sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data kualitatif, wawancara akan dilakukan dengan berbagai informan yang relevan.<sup>38</sup> Panduan wawancara ini mencakup pertanyaan terbuka yang dirancang untuk menggali informasi mendalam mengenai pengelolaan TPI, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan nelayan. Wawancara akan dilakukan dengan Kepala Desa, pengelola TPI, nelayan, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, serta tokoh masyarakat atau LSM yang berperan dalam hal ini. Berikut ini adalah informan dalam penelitian yaitu:

---

<sup>38</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 15.

**Tabel 3. 1**  
**Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala desa Lhok Bubon	1
2.	Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3
3.	Nelayan di Desa lhok Bubon (Tengkulak)	5
4.	Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat	1
5.	Tokoh Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	2
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>

## 2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian dalam situasi yang sebenarnya.<sup>39</sup> Observasi digunakan untuk mencatat hasil observasi yang dilakukan di lapangan, seperti kondisi fisik Tempat Pelelangan Ikan (TPI), fasilitas yang tersedia, serta interaksi antara nelayan, pengelola, dan pihak-pihak terkait lainnya. Lembar observasi ini juga akan mencatat aspek sosial-ekonomi yang berpengaruh pada kesejahteraan nelayan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji dokumen tertulis, gambar, atau rekaman yang relevan dengan objek penelitian.<sup>40</sup> Peneliti akan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang

<sup>39</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 145..

<sup>40</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 216.

relevan dengan pengelolaan TPI, termasuk data kebijakan, laporan tahunan, foto-foto kondisi TPI, dan data administratif yang dapat mendukung analisis.

### **E. Teknik Pengumpuln Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik untuk memperoleh informasi yang valid dan mendalam mengenai pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Lhok Bubon dan dampaknya terhadap kesejahteraan nelayan. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

#### **1. Observasi**

Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat sekaligus membandingkan atau memverifikasi data dari instansi terkait dengan kondisi nyata di lokasi penelitian. Observasi lapangan merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian untuk mendapatkan informasi dan data mengenai pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Lhok Bubon, Kecamatan Samatiga.<sup>41</sup>

Pemanfaatan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan para nelayan merupakan hal penting untuk diperhatikan, salah satunya adalah membangun tempat jualan ikan segi permanen, air bersih, kelistrikan, dan limbah pembuangan air siraman (got/parit), namun kenyataannya dilapangan ada beberapa para penjual ikan yang tidak mendapatkan fasilitas permanen tersebut dikarenakan lahan pembangunan TPI yang kurang luas, solusi

---

<sup>41</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 145.

sementara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan membangun tempat jual ikan sementara dari bahan kayu dan berlokasi diluar dari kawasan TPI salah satunya dipinggir jalan. Dengan adanya penjual ikan dipinggir jalan berakibat terjadinya kemacetan pada area tersebut sehingga terjadi kesenjangan sosial terhadap penjual lain. Permasalahan tersebut penting diperhatikan segera oleh pemerintah daerah agar kesejahteraan para nelayan merata dan peningkatan perekonomian nelayan juga ikut meningkat.

## **2. Wawancara**

Esterberg dalam Sugiyono (2009: 72) mendefinisikan interview atau wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu, wawancara terstruktur, semistruktur dan tidak terstruktur.<sup>42</sup> Berikut ini adalah subjek yang akan diwawancarai :

1. Kepala Desa Lhok Bubon
2. Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3. Nelayan/Tengkulak di Desa Lhok Bubon
4. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat
5. Tokoh masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

## **3. Studi Dokumentasi**

---

<sup>42</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 145.

Teknik studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan, seperti laporan kebijakan pengelolaan TPI, data administrasi, serta dokumentasi lain yang berkaitan dengan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan kondisi nelayan. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan atau dokumen yang dapat memberikan informasi tentang peraturan, perencanaan, atau perubahan yang telah terjadi terkait pengelolaan TPI.<sup>43</sup>

## **F. Analisis data**

Analisis data adalah langkah yang sangat penting untuk mengorganisasi informasi yang telah terkumpul agar dapat menghasilkan temuan yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>44</sup> Berdasarkan yang disebutkan tersebut, yang berkaitan dengan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Desa Lhok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. berikut adalah beberapa langkah analisis data yang dapat dilakukan:

### **1. Reduksi data**

Data yang dapat diperoleh dari kondisi lapangan dengan jumlah tertentu dan dalam bentuk data kuantitatif. Oleh karena itu dapat dilakukan reduksi data yang berti merangkum, memiliki hal-hal pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting dari tema dan polanya, serta membuang data yang tidak diperlukan.<sup>45</sup>

### **2. Display data**

---

<sup>43</sup>Aula Izatul Aini, Penetapan Harga Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Muncar Kabupaten Banyuwangi).

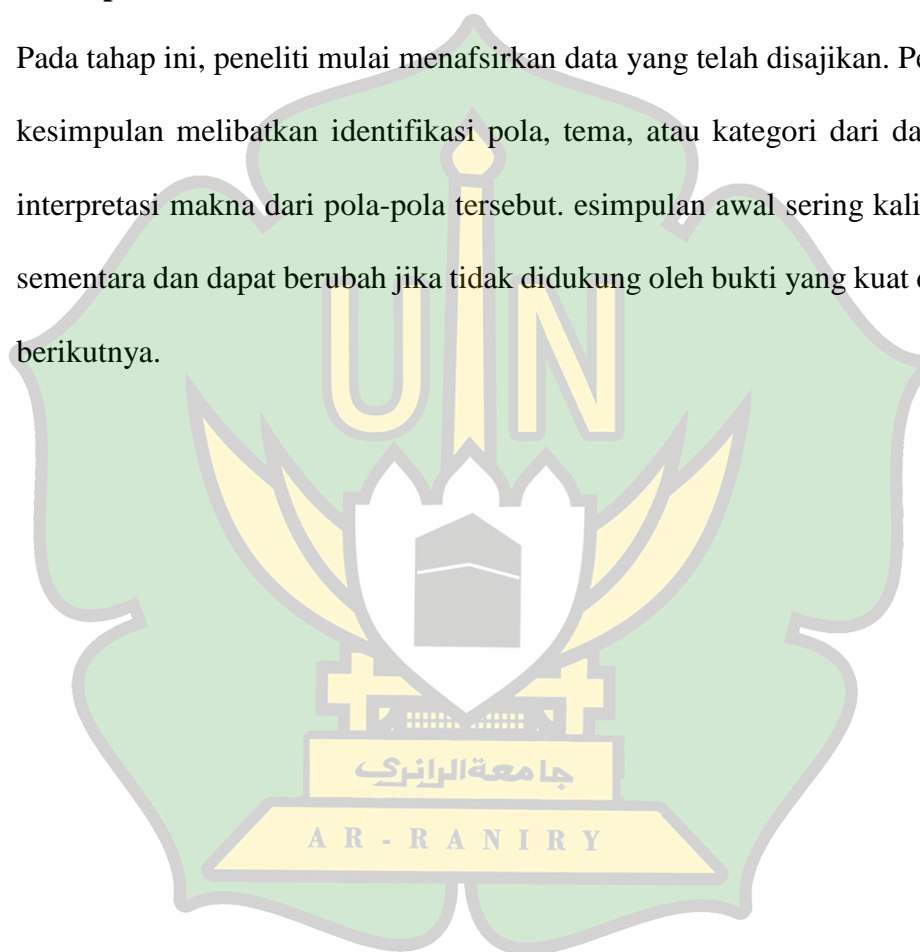
<sup>44</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 216.

<sup>45</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Cv Harfa Creatif, 2023), Hal 132.

Display data dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data ini merupakan bagian dari teknik analisis data kualitatif.

### 3. Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti mulai menafsirkan data yang telah disajikan. Penarikan kesimpulan melibatkan identifikasi pola, tema, atau kategori dari data, serta interpretasi makna dari pola-pola tersebut. Kesimpulan awal sering kali bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung oleh bukti yang kuat dari data berikutnya.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Gambaran umum tentang lokasi penelitian yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

##### **1. Profil Gampong Lhok Bubon**

Gampong Lhok Bubon merupakan salah satu gampong pesisir yang terletak di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, sementara sebagian lainnya bekerja di sektor perdagangan, jasa, dan pertanian kecil. Kondisi geografis gampong yang berada di pesisir pantai menjadikan potensi sumber daya laut sangat melimpah, khususnya hasil tangkapan ikan yang menjadi sumber utama ekonomi masyarakat.



Lokasi Kantor Balai Desa Gampong Lhok Bubon

Sumber : Peneliti, 2025

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Gampong Lhok Bubon dikenal memiliki rasa kebersamaan dan solidaritas yang tinggi. Tradisi gotong royong dan kerja sama antarwarga masih terjaga dengan baik, terutama dalam kegiatan sosial maupun kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas melaut dan pelelangan ikan.

## 2. Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Gampong Lhok Bubon

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Gampong Lhok Bubon merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi utama bagi masyarakat nelayan. TPI ini berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli hasil tangkapan nelayan secara terbuka dan teratur. Melalui sistem lelang, harga ikan diharapkan dapat terbentuk secara adil serta memberikan keuntungan yang layak bagi para nelayan. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara, pengelolaan TPI masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, ketidakstabilan harga ikan, serta kurangnya sistem pengawasan yang efektif.

Adapun sarana dan prasarana TPI di Gampong Lhok Bubon dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.2.  
Dokumentasi Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  
Sumber : Peneliti, 2025



Gambar 4.3.  
Dokumentasi Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  
Sumber : Peneliti, 2025

### 3. Struktur Pengelolaan TPI

Struktur pengelolaan TPI di Gampong Lhok Bubon terdiri atas pengurus inti yang melibatkan aparatur gampong, pengelola TPI, dan perwakilan nelayan. Kepala gampong memiliki peran penting sebagai penanggung jawab umum, sedangkan pelaksana teknis di lapangan bertugas mengatur pelaksanaan pelelangan, pencatatan hasil lelang, serta koordinasi antar pihak. Meski demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pembagian tugas dalam struktur tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih ada tumpang tindih fungsi dan kurangnya koordinasi rutin antar anggota.

### 4. Peran dan Fungsi TPI di Gampong Lhok Bubon

TPI di Gampong Lhok Bubon berfungsi tidak hanya sebagai tempat pelelangan hasil tangkapan, tetapi juga sebagai wadah penguatan ekonomi berbasis gampong. Melalui kegiatan pelelangan, hasil tangkapan nelayan dapat dipasarkan

dengan harga kompetitif dan transparan. Selain itu, TPI juga berperan dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam transaksi antara nelayan dan pembeli. Walau demikian, beberapa nelayan menyampaikan bahwa harga ikan sering mengalami fluktuasi tajam, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak selalu sebanding dengan usaha dan biaya yang telah dikeluarkan.

#### 5. Kelembagaan Nelayan

Kelembagaan nelayan di Gampong Lhok Bubon masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya terorganisir secara formal. Hubungan antar nelayan lebih banyak didasarkan pada rasa kebersamaan dan kepercayaan. Gotong royong dalam kegiatan melaut, perbaikan perahu, serta pembagian hasil tangkapan masih menjadi praktik sosial yang kuat. Selain itu, nelayan juga mendapatkan pengawasan informal dari warga sekitar, sehingga jika terjadi kesalahan dalam aktivitas lelang atau transaksi, teguran dapat diberikan secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial masyarakat masih menjadi fondasi utama dalam pengelolaan kegiatan perikanan di gampong

### **B. Hasil Penelitian**

#### **1. Sistem Pengelolaan TPI**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, sistem pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Lhok Bubon dapat dianalisis melalui empat fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

### a. Perencanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Lhok Bubon dilakukan dengan cara yang sederhana dan cenderung bersifat partisipatif. Proses ini melibatkan aparatur gampong, pengurus TPI, dan perwakilan nelayan, yang biasanya melaksanakan musyawarah gampong untuk menentukan strategi operasional, seperti pembagian tugas, jadwal pelelangan, serta pengaturan penggunaan fasilitas. Namun, hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan belum tertulis secara resmi dan tidak memiliki pedoman kerja yang sistematis. Hal ini menyebabkan pengelolaan TPI lebih banyak didasarkan pada keputusan spontan dan penyesuaian terhadap situasi harian.

Banyak keputusan diambil secara spontan berdasarkan kebutuhan harian. Selain itu, keterbatasan dana menjadi kendala utama dalam menjalankan program pengembangan TPI, seperti perbaikan alat timbang, pengadaan timbangan digital, maupun peningkatan fasilitas bangunan. Seorang informan menyatakan bahwa dana operasional sering kali tidak mencukupi, sehingga mereka harus menunda perbaikan alat atau mencari alternatif pembiayaan lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek perencanaan keuangan dan penganggaran masih perlu diperkuat.

Informan (Kepala TPI) menjelaskan bahwa kegiatan perencanaan biasanya dilakukan melalui diskusi informal antar pengurus tanpa adanya dokumen tertulis.

Ia menyebutkan bahwa pertemuan sering kali dilakukan apabila ada permasalahan mendesak, seperti pengaturan jadwal lelang atau pembagian area kerja.<sup>46</sup>

Hasil wawancara dengan seluruh informan, dapat diketahui bahwa proses perencanaan dalam pengelolaan TPI dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur gampong seperti pemerintah gampong, pengelola TPI, tokoh masyarakat, kelompok nelayan, serta perwakilan masyarakat.

Geuchik (Suherman) menjelaskan bahwa dalam penyusunan perencanaan, pihak yang terlibat bukan hanya aparatur gampong, tetapi juga tokoh nelayan dan pengelola. Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil bersifat adil dan dapat diterima semua pihak.<sup>47</sup> Pandangan ini dikuatkan oleh Pengelola (Agusmuler) yang menambahkan bahwa pengurus inti TPI, ketua kelompok nelayan, serta perwakilan gampong selalu diundang dalam musyawarah, sehingga arah pengelolaan memiliki dasar musyawarah yang kuat.<sup>48</sup>

Pengarah (Rismaidi) juga menegaskan bahwa tokoh masyarakat bersama perwakilan nelayan ikut hadir dalam rapat perencanaan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan di lapangan.<sup>49</sup> Sedangkan Pengawas (Taufik Vironi) menyebutkan bahwa aparat gampong, pengurus TPI, serta nelayan ikut terlibat, dan pihak pengawas turut memastikan jalannya proses sesuai aturan.<sup>50</sup>

Para nelayan (Ansari, Faisal, Misbah Israr, Heru, dan Suhardi) juga menyatakan bahwa mereka sering diundang dalam musyawarah dan diberi

---

<sup>46</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Agusmuler selaku ketua TPI sekaligus Pengelola, 02 Agustus 2025.

<sup>47</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Suherman selaku Geuchik Gampong, 02 Agustus 2025.

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Rismaidi selaku Pengarah TPI, 02 Agustus 2025.

<sup>50</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Taufik Vironi selaku Pengawas TPI, 08 Agustus 2025.

kesempatan untuk memberikan masukan, terutama terkait jadwal lelang, harga ikan, dan kebutuhan fasilitas. Menurut mereka, keterlibatan ini membuat hasil keputusan lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.<sup>51</sup>

Masyarakat (Arianto dan Reza) menambahkan bahwa mereka umumnya terlibat dalam rapat besar yang bersifat umum, sedangkan perencanaan teknis lebih banyak diurus oleh pengelola dan aparat gampong.<sup>52</sup> Pihak Dinas (Fahrurozi Amir) menegaskan bahwa peran mereka lebih sebagai fasilitator, dengan tujuan agar masyarakat gampong menjadi aktor utama dalam penyusunan perencanaan pengelolaan TPI.<sup>53</sup>

Seluruh informan memiliki pandangan yang sama mengenai tujuan utama perencanaan TPI, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menciptakan sistem pelelangan yang adil dan transparan. Geuchik menegaskan bahwa tujuan utama perencanaan adalah agar nelayan hidup lebih sejahtera dengan harga ikan yang adil. Hal ini diperkuat oleh Pengelola yang menyebutkan bahwa sistem lelang harus mencegah adanya permainan harga oleh pihak tertentu agar nelayan dan pembeli sama-sama diuntungkan.<sup>54</sup>

Pengarah dan Pengawas menjelaskan bahwa perencanaan juga dibuat untuk memastikan sistem berjalan teratur, efisien, serta menghindari kecurangan. Dengan adanya perencanaan yang baik, hubungan antar pihak menjadi lebih harmonis dan saling menguntungkan.

---

<sup>51</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Ansari, Faisal, Misbah Israr, Heru, dan Suhardi selaku nelayan TPI setempat, 11 Agustus 2025.

<sup>52</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Arianto dan Reza selaku Masyarakat dilingkungan TPI, 14 Agustus 2025.

<sup>53</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Fahrurozi Amir selaku Dinas, 18 Agustus 2025.

<sup>54</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Suherman selaku Geuchik Gampong, 02 Agustus 2025.

Para nelayan berpendapat bahwa perencanaan dibuat agar hasil tangkapan mereka dihargai dengan layak, dan sistem lelang memberikan perlindungan dari ketidakpastian harga. Mereka juga berharap agar kesejahteraan keluarga nelayan meningkat melalui pengelolaan yang tertib.

Masyarakat menyatakan bahwa sistem lelang yang teratur akan membantu roda perekonomian gampong. Sementara pihak Dinas menambahkan bahwa perencanaan dibuat untuk membangun sistem yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan nelayan serta ekonomi lokal.<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, proses perencanaan di TPI Gampong Lhok Bubon dilakukan melalui tahapan musyawarah gampong. Geuchik menjelaskan bahwa proses diawali dengan mendengar keluhan masyarakat, kemudian dilakukan rapat gampong untuk membahas masalah tersebut. Pengelola menambahkan bahwa data masalah di lapangan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum disusun menjadi rencana kerja.<sup>56</sup>

Menurut Pengarah, proses perencanaan dilakukan secara bertahap mulai dari diskusi kecil hingga musyawarah resmi, kemudian disusun program kerja dan dilaporkan ke pihak berwenang.<sup>57</sup> Pengawas menegaskan bahwa seluruh proses tersebut dipantau agar berjalan sesuai prosedur.<sup>58</sup>

Para nelayan menyebutkan bahwa mereka diberi kesempatan untuk memberikan masukan baik melalui forum kecil maupun rapat besar. Hasil musyawarah biasanya dirumuskan menjadi kesepakatan tertulis. Masyarakat

---

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>*Ibid.*

menuturkan bahwa mereka dapat menyampaikan saran melalui forum gampong, sedangkan pihak Dinas menjelaskan bahwa seluruh proses dilakukan dalam forum koordinasi resmi agar rencana yang dibuat lebih sistematis dan terarah.<sup>59</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala utama dalam proses perencanaan pengelolaan TPI, yaitu:

**Tabel 4.1 Proses Perencanaan dalam Pengelolaan TPI**

No	Kendala dalam Proses Perencanaan	Keterangan
1	Keterbatasan dana dan fasilitas	Geuchik dan nelayan menyampaikan bahwa dana operasional masih sangat terbatas sehingga banyak program pengembangan, seperti perbaikan timbangan dan peningkatan fasilitas, harus ditunda.
2	Kurangnya pemahaman nelayan terhadap sistem pengelolaan modern	Pengelola dan Pengawas menyatakan bahwa sebagian nelayan belum memahami konsep pengelolaan modern sehingga menghambat proses perencanaan.
3	Perbedaan pendapat antar pihak	Menurut Pengarah, musyawarah sering berlangsung lama karena sulit menyatukan pandangan dari seluruh pihak yang terlibat
4	Pengaruh kondisi eksternal (cuaca dan infrastruktur)	Kondisi cuaca dan infrastruktur yang kurang memadai turut mempengaruhi efektivitas proses perencanaan.

Pihak masyarakat juga menambahkan bahwa kurangnya regulasi tegas membuat penerapan hasil perencanaan tidak selalu konsisten.<sup>60</sup> Sementara pihak Dinas menilai bahwa kendala utama ada pada keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan sarana pendukung di lapangan.<sup>61</sup>

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Arianto dan Reza selaku Masyarakat dilingkungan TPI, 14 Agustus 2025.

<sup>61</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Fahrurrozi Amir selaku Dinas, 18 Agustus 2025.

Seluruh informan sepakat bahwa nelayan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan perencanaan TPI. Geuchik menegaskan bahwa nelayan selalu dilibatkan karena mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi lapangan.<sup>62</sup> Pengelola dan Pengarah menyampaikan bahwa pendapat nelayan sangat menentukan arah kebijakan, terutama terkait harga ikan dan jadwal lelang.<sup>63</sup>

Pengawas menambahkan bahwa nelayan dilibatkan sejak awal hingga akhir proses agar tidak ada keputusan yang merugikan pihak tertentu.<sup>64</sup> Para nelayan juga menegaskan bahwa mereka tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga aktif menyampaikan pendapat dan masukan.<sup>65</sup>

Masyarakat menilai bahwa keikutsertaan nelayan menjadikan proses perencanaan lebih transparan dan adil. Sedangkan pihak Dinas menyebutkan bahwa masukan nelayan selalu menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan akhir agar kebijakan yang dihasilkan berorientasi pada kebutuhan praktis di lapangan.<sup>66</sup>

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa TPI Gampong Lhok Bubon memiliki struktur organisasi sederhana, namun sudah mampu menjalankan fungsi dasar pengelolaan. Geuchik menjelaskan bahwa struktur terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa petugas pelaksana. Pengelola menambahkan bahwa struktur ini membantu pembagian tanggung jawab dan memastikan pelelangan berjalan tertib. Pengarah dan Pengawas menekankan pentingnya

---

<sup>62</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Suherman Selaku Geuchik Gampong, 02 Agustus 2025.

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>*Ibid.*

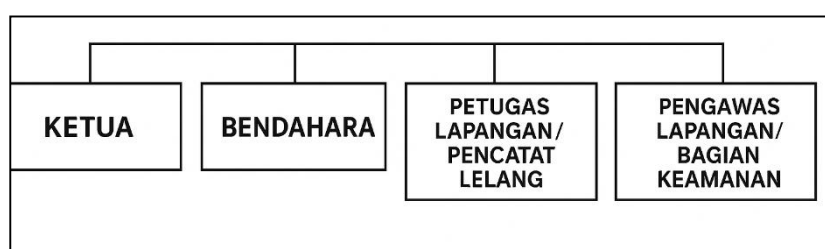
<sup>66</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Ansari, Faisal, Misbah Israr, Heru, dan Suhardi selaku nelayan TPI setempat, 11 Agustus 2025.

keberadaan struktur ini untuk memperjelas koordinasi serta mempermudah pengawasan.<sup>67</sup>

Para nelayan dan masyarakat juga mengakui keberadaan struktur ini meskipun masih sederhana. Mereka berharap struktur tersebut diperkuat dengan regulasi dan SOP yang lebih jelas.<sup>68</sup> Pihak Dinas menyatakan bahwa struktur organisasi yang ada sudah berfungsi baik sebagai kerangka kerja operasional, namun tetap membutuhkan peningkatan kapasitas dan formalitas agar lebih profesional. Berdasarkan hasil wawancara, struktur organisasi TPI terdiri dari:

- 1) Ketua (mengatur koordinasi dan kebijakan utama)
- 2) Sekretaris (mengurus administrasi dan pencatatan hasil lelang)
- 3) Bendahara (mengelola keuangan)
- 4) Petugas Lapangan/Pencatat Lelang
- 5) Bagian Keamanan/Pengawas Lapangan.

Struktur ini dinilai cukup efektif karena memungkinkan pembagian kerja yang jelas. Namun, baik masyarakat maupun pihak Dinas menilai bahwa struktur tersebut perlu disertai dengan SOP yang tertulis dan panduan kerja yang baku, agar pelaksanaan pengelolaan menjadi lebih terarah, transparan, dan akuntabel.



<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>*Ibid.*

Berdasarkan data-data lapangan di atas, maka tahapan perencanaan dilakukan dengan melibatkan beberapa aktor sebagaimana berikut:

**Tabel 4.2 Aktor yang Terlibat dalam Perencanaan**

No	Dimensi Aktor	Keterlibatan
1.	Ketua	Mengatur koordinasi, memimpin penyusunan kebijakan utama, dan menentukan arah perencanaan pengelolaan TPI
2.	Sekretaris	Mengurus administrasi, pencatatan hasil lelang, serta menyusun dokumen perencanaan dan laporan
3.	Bendahara	Mengelola keuangan, mengatur alokasi anggaran dalam proses perencanaan, dan memastikan ketersediaan dana operasional.
4.	Petugas Lapangan / Pencatat Lelang	Memberikan data lapangan, hasil lelang, kondisi operasional, serta kebutuhan teknis yang menjadi dasar perencanaan.
5.	Bagian Keamanan / Pengawas Lapangan	Memberikan informasi terkait keamanan, ketertiban, serta kendala lapangan yang mempengaruhi penyusunan perencanaan
6.	Masyarakat Nelayan	Menyampaikan kebutuhan, kendala, serta masukan terhadap program yang akan direncanakan
7.	Pihak Dinas (Pembina / Pengawas Pemerintah)	Melakukan pembinaan, memberikan rekomendasi, serta menilai efektivitas struktur dan SOP perencanaan agar lebih akuntabel.

#### **b. Pengorganisasian**

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan, pengorganisasian dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Lhok Bubon dilakukan melalui pembagian peran, struktur kerja, dan keterlibatan aktif berbagai pihak yang berfungsi menjaga agar sistem berjalan secara tertib dan transparan.

Geuchik Suherman menjelaskan bahwa pengorganisasian TPI telah memiliki struktur organisasi sederhana, yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, serta petugas lapangan. Struktur ini meskipun masih bersifat dasar,

sudah mampu menjalankan fungsi pengelolaan secara efektif karena setiap anggota mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.<sup>69</sup>

Ketua berperan dalam mengatur jadwal pelelangan dan koordinasi antar pengurus, bendahara mengelola dana serta arus kas, sekretaris mencatat seluruh kegiatan administrasi dan hasil lelang, sementara petugas lapangan menjaga ketertiban selama proses pelelangan berlangsung.

Hal senada disampaikan oleh Agusmuler selaku pengelola, bahwa keberadaan struktur organisasi mempermudah koordinasi antar anggota dan memastikan setiap kegiatan memiliki tanggung jawab yang jelas. Ia menambahkan bahwa walaupun struktur ini masih sederhana, namun sudah cukup membantu agar pengelolaan berjalan tertib dan efisien. Ketua TPI berfungsi sebagai pengambil keputusan utama, sekretaris bertugas mengatur pencatatan administrasi, bendahara mengatur keuangan, sedangkan petugas lelang memastikan keamanan dan kelancaran proses jual beli ikan.<sup>70</sup>

Rismaidi sebagai pengarah menambahkan bahwa setiap posisi memiliki peran spesifik yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ia menilai struktur yang sederhana justru memudahkan koordinasi, sebab komunikasi antar pengurus dan nelayan lebih cepat serta tidak terlalu birokratis. Selain itu, pengarah juga berperan dalam memberikan arahan umum dan memastikan setiap keputusan pengelolaan berpihak pada kepentingan nelayan.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Suherman selaku Geuchik Gampong, 06 Agustus 2025.

<sup>70</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Agusmuler selaku Ketua dan pengelola TPI, 11 Agustus 2025.

<sup>71</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Rismaidi selaku Pengarah TPI, 11 Agustus 2025.

Menurut Taufik Vironi selaku pengawas, struktur organisasi berfungsi sebagai dasar untuk menjalankan sistem pengawasan yang efektif. Ia menegaskan bahwa adanya pembagian tugas membantu proses pengawasan menjadi lebih sistematis, karena setiap pengurus memiliki tanggung jawab sesuai bidangnya. Pengawas juga ikut memastikan agar setiap kegiatan lelang berjalan transparan dan sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>72</sup>

Para nelayan seperti Ansari, Faisal, Misbah Israr, Heru, dan Suhardi juga mengakui bahwa struktur organisasi TPI sudah ada dan berjalan, meskipun masih sederhana. Mereka memahami siapa saja yang bertanggung jawab di lapangan dan kepada siapa harus menyampaikan aspirasi atau keluhan. Menurut mereka, ketua TPI mengatur jadwal lelang, bendahara mengelola uang hasil penjualan, sekretaris mencatat harga dan hasil transaksi, sedangkan petugas keamanan menjaga ketertiban selama proses lelang berlangsung. Para nelayan juga menilai pembagian tugas tersebut sudah jelas, meskipun tetap membutuhkan pengawasan agar semua pihak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.<sup>73</sup>

Sementara itu, masyarakat gampong seperti Arianto dan Reza menilai bahwa struktur organisasi TPI memang sudah berjalan, namun perlu diperkuat agar lebih resmi dan memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*) yang jelas. Menurut mereka, pembagian tugas sudah cukup baik, tetapi peningkatan kapasitas

---

<sup>72</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Taufik Vironi selaku Pengawas TPI, 13 Agustus 2025.

<sup>73</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Ansari, Faisal, Misbah Israr, Heru, dan Suhardi selaku Nelayan 13 Agustus 2025.

sumber daya manusia dan pelatihan bagi pengurus TPI masih sangat diperlukan agar sistem pengelolaan menjadi lebih profesional dan berkelanjutan.<sup>74</sup>

Dari sisi pemerintah daerah, melalui pernyataan Fahrurozi Amir dari Dinas Kelautan dan Perikanan, dijelaskan bahwa struktur organisasi TPI Gampong Lhok Bubon memang masih tergolong sederhana, namun memiliki fungsi penting dalam menjaga kelancaran sistem pelelangan. Pihak dinas berperan sebagai fasilitator dan memberikan dukungan pembinaan agar pengelolaan dapat dilakukan secara akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan nelayan.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian TPI Gampong Lhok Bubon telah berjalan dengan baik meskipun masih dalam bentuk sederhana. Struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan petugas lapangan menjadi fondasi utama dalam mengatur jalannya pelelangan ikan. Pembagian tugas yang jelas membuat setiap pengurus memahami tanggung jawabnya masing-masing, sementara keterlibatan nelayan dan dukungan pemerintah gampong menjadikan sistem pengelolaan lebih transparan, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat pesisir secara nyata.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengorganisasian yang dilakukan dapat digambarkan sebagaimana berikut:

---

<sup>74</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Arianto dan Reza selaku Masyarakat Gampong di Lingkungan TPI, 16 Agustus 2025.

<sup>75</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Fahrurozi Amir dari Dinas Kelautan dan Perikanan, 21 Agustus 2025.

**Tabel 4.3 Pengorganisasian dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Lhok Bubon**

No.	Aktor	Peran	Keterlibatan
1.	Ketua TPI	Mengatur jadwal pelelangan, mengoordinasikan pengurus, dan menjadi pengambil keputusan utama	Memimpin pengelolaan TPI, berkoordinasi dengan sekretaris, bendahara, petugas lapangan, menerima aspirasi nelayan, serta menjadi pusat komunikasi antar aktor
2.	Sekretaris	Mengurus administrasi dan pencatatan hasil lelang	Mencatat seluruh kegiatan administrasi, harga ikan, dan transaksi lelang; memastikan dokumen tertib dan menjadi dasar laporan
3.	Petugas Lapangan / Petugas Lelang	Menjaga ketertiban proses pelelangan dan kelancaran transaksi	Bertugas langsung di lapangan, mencatat hasil transaksi, menjaga ketertiban, serta memastikan proses lelang berjalan aman dan efisien
4.	Pengarah (Rismaidi)	Memberikan arahan umum dan memastikan kebijakan berpihak pada nelayan	Menilai kesesuaian keputusan, membantu komunikasi antara pengurus dan nelayan, serta memastikan pengelolaan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat
5.	Pengawas (Taufik Vironi)	Menjalankan fungsi pengawasan agar pelelangan transparan	Mengawasi jalannya pelelangan, memastikan setiap pengurus menjalankan tugas sesuai bidang, serta menjaga agar lelang sesuai kesepakatan bersama
6.	Nelayan (Ansari, Faisal, Misbah Israr, Heru, Suhardi)	Peserta utama pelelangan sekaligus pemberi masukan	Mengikuti proses lelang, memahami pembagian tugas pengurus, menyampaikan aspirasi atau keluhan, serta menilai ketertiban pelaksanaan
7.	Masyarakat Gampong (Arianto, Reza)	Penilai kinerja TPI dan pemberi dorongan untuk peningkatan kualitas	Memberikan masukan, menilai perlunya SOP dan peningkatan kapasitas pengurus, serta mendukung peningkatan profesionalitas TPI
8.	Dinas Kelautan dan Perikanan (Fahrurozi Amir)	Fasilitator dan pembina sistem pengelolaan	Memberikan pembinaan, dukungan, dan memastikan pengelolaan dilakukan secara akuntabel serta berorientasi pada kesejahteraan nelayan

### c. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pelaksanaan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Lhok Bubon dijalankan

secara gotong royong dan penuh partisipasi antara pihak pengelola, aparaturnya, dan nelayan. Proses pelaksanaan ini mencakup kegiatan operasional pelelangan, mekanisme koordinasi antar pihak, serta sistem pembagian hasil yang dijalankan setiap hari.

Geuchik Suherman menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pelelangan di TPI berlangsung setelah kapal nelayan bersandar di pelabuhan. Begitu ikan diturunkan dari kapal, pengelola TPI langsung menyiapkan proses lelang agar tidak memakan waktu lama. Semua dilakukan secara cepat dan terbuka di depan para nelayan dan pembeli. Ia mengatakan, “Biasanya setelah kapal sandar, langsung kita lelang. Jadi ikan masih segar dan pembeli juga nggak nunggu lama.”<sup>76</sup>

Menurut Agusmuler, selaku pengelola TPI, pelaksanaan lelang dilakukan secara sederhana dan masih manual, namun tetap mengutamakan keterbukaan. Setiap harga ikan yang dilelang diumumkan secara langsung kepada para pembeli, sedangkan nelayan akan menerima hasil sesuai dengan kesepakatan. Ia menambahkan, “Sekarang masih pakai sistem manual, dicatat biasa saja. Belum pakai komputer atau aplikasi, karena ya masih banyak yang belum paham. Tapi semua tetap terbuka, biar nggak ada curiga-curigaan.”<sup>77</sup>

Rismaidi selaku pengarah menuturkan bahwa proses pelelangan biasanya dimulai dari pengumpulan ikan, penentuan harga dasar, lalu proses tawar-menawar antara pembeli. Semua dilakukan dengan pengawasan ketat agar tidak ada permainan harga. Ia mengatakan, “Setiap langkahnya kita pantau, dari ikan turun

---

<sup>76</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Suherman selaku Geuchik, 21 Agustus 2025.

<sup>77</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Agusmuler selaku Pengelola TPI, 21 Agustus 2025.

sampai selesai lelang. Kalau ada yang nyeleneh, langsung ditegur. Kita jaga supaya harga tetap adil buat nelayan.”<sup>78</sup>

Pengawasan lapangan, Taufik Vironi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan TPI, para petugas memiliki peran masing-masing. Ketua mengatur jadwal dan koordinasi, bendahara mencatat transaksi uang hasil lelang, sedangkan petugas lapangan menjaga keamanan selama proses berlangsung. Ia menyebutkan bahwa pengawasan lapangan cukup ketat, meskipun belum ada sistem digital yang mempermudah pencatatan data.<sup>79</sup>

Para nelayan seperti Ansari, Faisal, Misbah Israr, Heru, dan Suhardi memberikan pandangan serupa. Mereka menjelaskan bahwa pelaksanaan lelang biasanya berjalan tertib karena semua pihak sudah tahu tugasnya masing-masing. Nelayan membawa hasil tangkapan ke lokasi lelang, kemudian pengurus membantu mencatat, menimbang, dan mengumumkan harga. Salah satu nelayan menuturkan, “Kita biasanya langsung bawa hasil tangkapan ke TPI, nanti pengurus bantu timbang dan umumkan harga. Kalau cocok, langsung dijual. Semua terbuka, nggak ada yang disembunyikan.”<sup>80</sup>

Mereka juga menambahkan bahwa faktor cuaca menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pelelangan. Jika cuaca buruk, jumlah ikan berkurang dan pembeli juga lebih sedikit. Selain itu, kondisi lokasi TPI yang becek saat hujan sering menyulitkan proses bongkar ikan. Namun, para nelayan tetap berusaha

---

<sup>78</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Rismaidi Selaku Pengarah Nelayan di TPI, 21 Agustus 2025.

<sup>79</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Taufik Vironi selaku Pengawas di TPI, 21 Agustus 2025.

<sup>80</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Ansari, Faisal, Misbah Israr, Heru, dan Suhardi Selaku Nelayan di TPI, 21 Agustus 2025.

menjaga agar proses lelang bisa tetap berjalan meskipun dengan fasilitas yang terbatas.<sup>81</sup>

Dari sisi masyarakat gampong, seperti Arianto dan Reza, mereka melihat bahwa pelaksanaan kegiatan lelang sudah berjalan dengan baik, meskipun ada hal-hal yang perlu diperbaiki, seperti fasilitas penunjang dan sistem pencatatan. Masyarakat ikut membantu terutama dalam kegiatan gotong royong membersihkan area TPI dan menjaga kelancaran acara lelang.<sup>82</sup>

Fahrurozi Amir dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan lelang di Gampong Lhok Bubon sudah menunjukkan semangat kemandirian masyarakat pesisir. Menurutnya, meskipun masih dilakukan secara manual, sistem pelelangan ini tetap berjalan baik karena adanya rasa tanggung jawab bersama dan partisipasi aktif dari semua pihak. Pemerintah daerah juga terus mendorong agar TPI ke depan dapat menerapkan sistem digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.<sup>83</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan TPI Gampong Lhok Bubon berjalan dengan baik meskipun masih menggunakan metode tradisional. Setiap kegiatan dilakukan dengan prinsip keterbukaan, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Para pengurus, nelayan, serta masyarakat saling bekerja sama agar proses pelelangan berjalan lancar dan adil. Namun demikian, dibutuhkan dukungan

---

<sup>81</sup>*Ibid.*

<sup>82</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Arianto dan Reza selaku Masyarakat Gampong di Lingkungan TPI, 16 Agustus 2025.

<sup>83</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Fahrurozi Amir dari Dinas Kelautan dan Perikanan, 21 Agustus 2025..

fasilitas, pelatihan penggunaan teknologi, serta peningkatan kapasitas pengurus agar pelaksanaan ke depan lebih modern, efisien, dan transparan.

Pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan di TPI Gampong Lhok Bubon berlangsung setiap kali nelayan kembali dari melaut. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan kegiatan ini masih bersifat tradisional dan dilakukan dengan cara yang sederhana namun tetap menjunjung nilai kejujuran dan kebersamaan. Aktivitas pelelangan biasanya dimulai dengan penurunan hasil tangkapan dari kapal, kemudian ikan ditimbang secara manual menggunakan timbangan analog. Setelah itu, proses lelang dilakukan secara terbuka di hadapan para pembeli yang sebagian besar berasal dari wilayah sekitar, seperti pedagang ikan, pengecer, dan masyarakat umum.

Salah satu informan menjelaskan bahwa pelaksanaan lelang sudah menjadi rutinitas yang dikenal oleh masyarakat setempat tanpa perlu aturan tertulis. Semua pihak sudah memahami peran masing-masing, mulai dari nelayan sebagai pemasok, pengelola sebagai pengatur jalannya pelelangan, hingga pembeli yang mengikuti proses penawaran harga. Dalam pelaksanaannya, pengelola juga memastikan agar transaksi berjalan tertib dan adil. Namun, karena belum ada sistem digital atau administrasi yang baku, proses pencatatan hasil lelang masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan.

Beberapa kendala juga ditemukan dalam tahap pelaksanaan ini. Berdasarkan hasil wawancara, keterbatasan fasilitas seperti alat timbang yang sudah tua, kondisi tempat pelelangan yang sempit, dan minimnya penerangan menjadi hambatan tersendiri. Selain itu, cuaca yang tidak menentu kerap

memengaruhi jumlah hasil tangkapan dan jadwal pelaksanaan lelang. Salah satu informan menyatakan bahwa kegiatan lelang terkadang harus ditunda karena kondisi cuaca buruk atau kapal nelayan belum kembali.

Meski demikian, semangat gotong royong dan rasa kebersamaan tetap menjadi kekuatan utama dalam menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan di TPI Gampong Lhok Bubon. Pengelola dan nelayan berupaya saling membantu agar kegiatan tetap berjalan meskipun dengan fasilitas yang terbatas. Upaya sederhana seperti perbaikan mandiri pada alat timbang atau pembersihan lokasi lelang dilakukan secara sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelelangan ikan berbasis gampong masih sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan nilai-nilai sosial yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir.

**Tabel 4.4 Pelaksanaan Pelelangan**

No	Aktor/ Pihak yang terlibat	Kegiatan Operasional yang dilakukan	Koordinasi dengan pihak siapa saja	Sistem pemagian hasil
1.	Geuchik (Suherman)	Mengatur jalannya pelelangan, memastikan proses berlangsung cepat setelah kapal sandar; memastikan pelaksanaan terbuka di depan nelayan dan pembeli.	Pengelola TPI, aparatur gampong, nelayan, pembeli.	Mengikuti kesepakatan bersama antara nelayan dan pengurus TPI.
2.	Pengelola TPI (Agumuler)	Menyiapkan proses lelang, mencatat transaksi secara manual, mengumumkan harga secara terbuka, memastikan keterbukaan dalam transaksi.	Nelayan, pembeli, geuchik, petugas lapangan.	Pembagian dilakukan sesuai catatan manual dan kesepakatan antara nelayan dan pengelola.
3.	Pengawas	Mengawasi setiap langkah pelelangan mulai dari pengumpulan ikan,	Pengelola, nelayan, pembeli, petugas lapangan.	Mengawasi agar hasil diterima nelayan secara adil sesuai harga lelang.

		penentuan harga dasar, hingga tawar-menawar; mencegah permainan harga.		
4.	Petugas Lapangan (Taufik Vironi)	Menjaga keamanan lokasi lelang, mengatur alur kegiatan, membantu proses penurunan ikan dan pengawasan teknis	Pengelola, ketua TPI, bendahara, nelayan.	Tidak terlibat dalam pembagian hasil, tetapi memastikan proses berlangsung aman dan tertib.
5.	Nelayan (Ansari, Faisal, Misbah Israr, Heru, Suhardi)	Membawa hasil tangkapan ke TPI, menyerahkan untuk ditimbang, mengikuti proses lelang, menerima pembayaran dari pengurus.	Pengelola, petugas lapangan, pembeli, aparatur gampong.	Menerima hasil sesuai harga lelang yang disepakati, dibayar langsung atau sesuai pencatatan.
6.	Masyarakat Gampong (Arianto, Reza)	Membantu menjaga kebersihan dan kelancaran area TPI melalui gotong royong; ikut memantau agar lelang berjalan lancar.	Aparatur gampong, pengelola TPI, nelayan.	Tidak terlibat dalam pembagian hasil.
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan (Fahrurozi Amir)	Melakukan pengawasan umum, memberi arahan, mendorong digitalisasi dan peningkatan fasilitas.	Pengelola TPI, aparatur gampong.	Tidak ikut dalam pembagian hasil, hanya sebagai pembina teknis.

#### d. Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, fungsi pengawasan dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Lhok Bubon sudah berjalan namun masih bersifat sederhana dan belum memiliki sistem baku. Pengawasan umumnya dilakukan secara langsung oleh aparatur gampong dan pengelola TPI, tanpa adanya prosedur tertulis atau laporan berkala.

Beberapa informan menyatakan bahwa kegiatan pengawasan biasanya dilakukan dengan cara memantau langsung aktivitas lelang di lapangan, seperti memastikan kehadiran nelayan, memeriksa kondisi ikan, serta mengawasi proses transaksi agar berjalan sesuai kesepakatan harga. Salah satu informan menjelaskan:

“Kami biasanya langsung turun ke lokasi saat lelang berlangsung, melihat apakah prosesnya berjalan lancar dan tidak ada kecurangan. Kalau ada masalah, langsung dibicarakan di tempat.”<sup>84</sup>

Namun demikian, dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa sistem pengawasan ini masih memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah tidak adanya jadwal pengawasan yang tetap, sehingga aktivitas kontrol terkadang hanya dilakukan ketika muncul permasalahan. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas juga menyebabkan beberapa kegiatan tidak terpantau secara menyeluruh.

Seorang informan lain menuturkan:

“Pengawasan masih kurang karena petugasnya sedikit. Kadang ada kegiatan lelang yang tidak sempat diawasi, apalagi kalau bersamaan dengan kegiatan lain di gampong.”<sup>85</sup> Selain faktor sumber daya manusia, keterbatasan dana operasional juga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Anggaran yang minim membuat kegiatan monitoring, seperti pengecekan alat timbang, kondisi fasilitas TPI, dan administrasi hasil lelang, tidak dapat dilakukan secara rutin.

Walaupun demikian, pihak gampong berupaya menjaga transparansi melalui musyawarah rutin dan komunikasi langsung antara pengelola, nelayan, dan aparat desa. Dengan cara ini, setiap kendala yang muncul dapat segera dibahas bersama untuk mencari solusi terbaik. Salah satu informan menyebutkan: “Kami mengutamakan keterbukaan. Kalau ada masalah atau kekurangan dalam

---

<sup>84</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Ansari, Faisal, Misbah Israr, Heru, dan Suhardi selaku Nelayan 13 Agustus 2025.

<sup>85</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Taufik Vironi selaku Pengawas TPI, 13 Agustus 2025

pengelolaan, langsung dibicarakan dalam rapat. Jadi semua pihak tahu dan bisa ikut memberi masukan.”<sup>86</sup>

Dari hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan di TPI Gampong Lhok Bubon telah dilakukan namun masih bersifat tradisional dan reaktif, belum terarah dengan sistem administrasi yang jelas. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan, pembentukan tim pengawas khusus, serta dukungan dana operasional yang memadai agar fungsi kontrol dapat berjalan secara berkesinambungan dan profesional.

Fasilitas yang terbatas menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pelelangan. Berdasarkan hasil observasi, lokasi pelelangan sering kali becek, terutama setelah hujan, sehingga menyulitkan aktivitas nelayan dan pembeli. Kondisi tempat pelelangan yang sempit serta kurangnya penerangan juga menjadi hambatan tersendiri. Salah satu informan menyampaikan bahwa kegiatan lelang kadang ditunda karena kondisi cuaca buruk atau kapal nelayan belum kembali ke darat. Walaupun demikian, semangat gotong royong antar nelayan dan pengelola masih kuat. Mereka berinisiatif melakukan perbaikan ringan pada fasilitas dan menjaga kebersihan lokasi pelelangan secara sukarela agar kegiatan dapat terus berjalan lancar.

Dalam hal pengawasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pelelangan ikan di TPI Gampong Lhok Bubon masih belum optimal. Pengawasan lebih banyak dilakukan secara informal oleh aparat

---

<sup>86</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Taufik Vironi selaku Pengawas TPI, 13 Agustus 2025

gampong dan pengelola TPI tanpa adanya sistem kontrol yang baku. Salah satu informan menyebutkan bahwa apabila terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur, biasanya diselesaikan melalui musyawarah bersama, bukan dengan sanksi tegas. Pernyataan informan tersebut menggambarkan bahwa regulasi dan mekanisme pengawasan masih bersifat luwes dan bergantung pada kesadaran masing-masing pihak.

Beberapa informan juga mengakui bahwa kurangnya regulasi yang tegas dan belum adanya panduan tertulis membuat pengawasan sulit dilakukan secara konsisten. Kadang terdapat pihak yang tidak mematuhi aturan, seperti keterlambatan pembayaran hasil lelang atau penggunaan alat timbang yang tidak akurat, namun belum bisa langsung diberikan tindakan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan dana operasional turut memengaruhi efektivitas pengawasan di lapangan.

Meskipun demikian, ada kesadaran dari masyarakat dan pengelola bahwa pengawasan sangat penting untuk menjaga kejujuran dan transparansi dalam proses pelelangan. Oleh karena itu, beberapa upaya telah diusulkan oleh informan, seperti perlunya pelatihan manajemen, dukungan dana dari pemerintah daerah, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, serta digitalisasi sistem lelang agar proses pengawasan menjadi lebih mudah dan akurat. Seorang informan menyebutkan bahwa apabila sistem digital diterapkan, setiap transaksi akan tercatat otomatis sehingga peluang kecurangan dapat diminimalkan.

**Tabel 4.5 Pelaksanaan Pengawasan dalam Pelelangan**

No	Aktor yang terlibat	Keterangan (Pengawasan seperti apa yang dilakukan)
1.	Aparatur Gampong	Melakukan pengawasan langsung di lokasi TPI saat pelelangan berlangsung, memastikan proses berjalan lancar, tidak ada kecurangan, serta memantau kesesuaian harga. Belum memiliki jadwal tetap dan tidak disertai SOP
2.	Pengelola TPI	Mengawasi proses transaksi, pencatatan hasil lelang, kondisi fasilitas, dan aktivitas nelayan. Pengawasan masih bersifat informal dan dilakukan bila ada masalah yang muncul.
3.	Petugas Lapangan/Pencatat Lelang	Memastikan proses pencatatan dilakukan dengan benar, mengawasi ketepatan penggunaan alat timbang, serta memantau kelancaran alur lelang dari awal hingga akhir.
4.	Bagian Keamanan/Pengawas Lapangan	Mengawasi ketertiban selama pelelangan, menghindari keributan atau kecurangan, dan memastikan area pelelangan aman bagi nelayan dan pembeli
5.	Nelayan	Mengawasi secara partisipatif dengan melaporkan jika ada ketidaksesuaian, seperti keterlambatan pembayaran atau ketidakakuratan timbangan. Pengawasan dilakukan secara informal berdasarkan pengalaman lapangan
6.	Pembeli/Pengepul	Ikut mengawasi proses lelang agar harga sesuai kesepakatan serta memastikan kualitas ikan dan transparansi transaksi.
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Memberikan pengawasan umum melalui koordinasi dan masukan, namun belum melakukan monitoring intensif karena keterbatasan anggaran dan tidak adanya sistem kontrol baku
8.	Masyarakat/Pengawas Sosial	Mengawasi melalui musyawarah rutin dan memberikan masukan ketika terjadi masalah. Menjadi bagian dari pengawasan sosial untuk menjaga transparansi.

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan masih bersifat informal: Pengawasan yang dilakukan saat ini masih belum memiliki jadwal tetap dan tidak disertai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Pengawasan tidak dilakukan secara terstruktur dan tidak ada ketepatan dalam

proses pencatatan, penggunaan alat timbang, dan alur lelang. Pengawasan tidak efektif dalam menghindari keributan atau kecurangan selama pelelangan. selain itu pengawasan tidak memastikan area pelelangan aman bagi nelayan dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak pembeli atau tengkulak, diketahui bahwa keberadaan tengkulak memiliki keterlibatan tidak langsung dalam proses perencanaan kegiatan pelelangan ikan di TPI Gampong Lhok Bubon. Informan menyampaikan bahwa pengurus TPI biasanya mempertimbangkan kondisi pasar, permintaan pembeli, serta harga pasar yang berkembang sebelum pelaksanaan lelang. Informasi tersebut sering diperoleh dari komunikasi antara pengurus TPI dan tengkulak sebagai pihak yang memahami pergerakan harga dan kebutuhan pasar. Dengan demikian, keberadaan tengkulak turut memberikan gambaran awal bagi pengurus dalam menyusun strategi pelelangan agar harga tetap kompetitif dan menguntungkan nelayan.

Pada aspek pengorganisasian, tengkulak menjadi bagian dari struktur pelaksana kegiatan pelelangan sebagai pihak pembeli yang berinteraksi langsung dengan nelayan dan pengurus TPI. Informan menjelaskan bahwa pembagian peran selama kegiatan lelang sudah berjalan cukup jelas, di mana pengurus bertugas mengatur jalannya lelang, nelayan menyediakan hasil tangkapan, dan tengkulak melakukan proses penawaran serta distribusi hasil tangkapan ke pasar. Keterlibatan berbagai pihak ini menciptakan sistem kerja yang saling melengkapi dan membantu menjaga kelancaran proses pelelangan.

Dalam aspek pelaksanaan, tengkulak berperan sebagai pembeli utama yang membantu memperlancar distribusi hasil tangkapan nelayan. Informan menyatakan

bahwa sistem pelelangan terbuka memudahkan mereka mengetahui harga ikan secara langsung dan mencegah praktik penentuan harga secara sepihak. Proses pelaksanaan yang melibatkan nelayan, pengurus TPI, dan pembeli secara bersamaan dinilai mampu menciptakan mekanisme transaksi yang lebih transparan serta mengurangi konflik antara nelayan dan pembeli. Namun demikian, informan juga mengungkapkan adanya kendala dalam pelaksanaan, seperti keterbatasan fasilitas, kondisi infrastruktur TPI yang belum sepenuhnya memadai, serta proses pencatatan transaksi yang masih dilakukan secara manual karena keterbatasan sarana teknologi, kurangnya pelatihan, dan belum adanya kebijakan resmi terkait digitalisasi.

Sementara itu, pada aspek pengawasan, tengkulak secara tidak langsung turut berperan dalam menjaga transparansi proses pelelangan. Informan menyampaikan bahwa sistem lelang terbuka yang disaksikan oleh nelayan, pengurus, dan pembeli memungkinkan setiap pihak saling mengawasi jalannya transaksi sehingga potensi kecurangan dapat diminimalkan. Selain itu, keterlibatan banyak pihak dalam satu waktu juga menciptakan kontrol sosial yang membantu memastikan harga dan proses pelelangan berjalan sesuai kesepakatan bersama.

Dapat disimpulkan hasil wawancara menunjukkan bahwa tengkulak tidak hanya berperan sebagai pembeli, tetapi juga menjadi bagian dari proses manajemen pelelangan ikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Keterlibatan mereka membantu menciptakan transparansi harga, kelancaran distribusi ikan, serta mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi pesisir di TPI Gampong Lhok Bubon.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Pengelolaan Pelelangan Ikan Berbasis Gampong di TPI Gampong Lhok Bubon

### 1. Faktor Pendukung Pengelolaan TPI

#### a. Dukungan Masyarakat dan Rasa Kebersamaan

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu faktor pendukung utama dalam penerapan pengelolaan pelelangan ikan berbasis gampong adalah dukungan masyarakat dan rasa kebersamaan yang masih kuat. Geuchik menjelaskan bahwa masyarakat Gampong Lhok Bubon sangat mendukung kegiatan TPI karena mereka memahami bahwa hasil dari aktivitas pelelangan ikan pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat sendiri dalam bentuk peningkatan ekonomi lokal.<sup>87</sup>

Pernyataan ini dikuatkan oleh pengelola TPI yang menyebutkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, seperti membersihkan area TPI dan membantu perbaikan fasilitas ringan.<sup>88</sup>

Beberapa nelayan juga menuturkan hal serupa. Mereka menyebutkan bahwa masyarakat sekitar sering membantu tanpa pamrih ketika ada kegiatan bersama, seperti pembersihan area atau kegiatan sosial yang diadakan oleh pihak TPI.<sup>89</sup>

Menurut informan masyarakat, solidaritas warga masih tinggi dan semangat gotong royong tetap terjaga. “Kalau ada kerjaan rame-rame, orang gampong sama nelayan biasanya turun bareng,” ujar salah satu warga. Dukungan sosial ini

---

<sup>87</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Suherman Selaku Geuchik Gampong, 06 Agustus 2025.

<sup>88</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Agusmuler Selaku ketua TPI Sekaligus Pengelola, 02 Agustus 2025

<sup>89</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Ansari, Faisal, Misbah Israr, Heru, dan Suhardi selaku Nelayan 13 Agustus 2025.

menciptakan suasana kerja yang harmonis dan memperkuat penerapan pengelolaan berbasis gampong.<sup>90</sup>

Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengakui bahwa peran serta masyarakat menjadi faktor penting dalam keberlanjutan pengelolaan TPI. Mereka menilai bahwa dukungan sosial dan partisipasi warga merupakan modal sosial yang memperkuat sistem berbasis gampong.<sup>91</sup>

#### b. Kerja Sama dan Kepedulian Antarnelayan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kerja sama antar nelayan di Gampong Lhok Bubon tergolong sangat baik. Pengelola menjelaskan bahwa para nelayan mudah diajak berkoordinasi dan cepat bersatu jika ada kepentingan bersama, misalnya dalam memperbaiki peralatan, membersihkan tempat pelelangan, atau menghadapi masalah harga ikan di pasar.<sup>92</sup>

Seorang nelayan menyampaikan bahwa “Kalau soal kerja sama, nelayan di sini okelah, gampang nyatu kalau ada kepentingan bersama.” Hal ini menggambarkan adanya rasa saling mendukung antaranggota kelompok nelayan yang memudahkan proses penerapan kebijakan pengelolaan TPI. Selain itu, masyarakat menambahkan bahwa rasa kebersamaan ini juga tampak ketika terjadi persoalan atau kendala, karena mereka cenderung menyelesaikan secara

---

<sup>90</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Arianto dan Reza selaku Masyarakat dilingkungan TPI, 14 Agustus 2025.

<sup>91</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Fahrurozi Amir selaku Dinas, 18 Agustus 2025.

<sup>92</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Agusmuler selaku ketua TPI Sekaligus Pengelola, 02 Agustus 2025.

musyawarah tanpa konflik berkepanjangan. Faktor ini menjadi kekuatan sosial yang mendukung efektivitas pengelolaan TPI secara berkelanjutan.<sup>93</sup>

#### c. Pengawasan Internal

Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan internal juga menjadi salah satu faktor pendukung yang menjaga keberlangsungan pengelolaan TPI. Pengawas (Taufik Vironi) menjelaskan bahwa pihaknya selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan lelang dan aktivitas harian di TPI. Menurutnya, selalu ada pihak yang mengawasi dari dalam agar setiap kegiatan berjalan sesuai aturan, dan bila ditemukan kesalahan dapat segera ditegur.<sup>94</sup>

Nelayan pun mengonfirmasi hal ini dengan mengatakan bahwa pengawasan memang sudah berjalan walaupun belum sepenuhnya sempurna. Kehadiran pengawasan internal dinilai efektif dalam menjaga keteraturan dan mencegah penyimpangan yang bisa merugikan pihak nelayan maupun pengelola.<sup>95</sup>

#### d. Program dan Dukungan Pemerintah

Faktor pendukung lain yang cukup signifikan adalah adanya dukungan program dari pemerintah daerah maupun instansi terkait, terutama dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

Geuchik menyebutkan bahwa beberapa tahun terakhir telah ada program yang membantu TPI, seperti pelatihan, pemberian peralatan, serta peningkatan

---

<sup>93</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Ansari, Faisal, Misbah Israr, Heru, dan Suhardi selaku Nelayan 13 Agustus 2025.

<sup>94</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Taufik Vironi selaku Pengawas TPI, 13 Agustus 2025.

<sup>95</sup> dari wawancara oleh Bapak Ansari, Faisal, Misbah Israr, Heru, dan Suhardi selaku Nelayan 13 Agustus 2025.

fasilitas dasar.<sup>96</sup> Pengelola menambahkan bahwa program pemerintah ini memberikan pengetahuan baru bagi pengelola dan nelayan, terutama dalam hal administrasi dan manajemen pelelangan.<sup>97</sup> Menurut perwakilan Dinas, dukungan yang diberikan tidak hanya berupa bantuan fasilitas, tetapi juga pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pengelolaan TPI lebih profesional dan berdaya saing.<sup>98</sup>

#### e. Potensi Digitalisasi dan Modernisasi Sistem Lelang

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir semua informan mendukung digitalisasi sistem lelang sebagai upaya modernisasi pengelolaan. Pengelola dan Dinas menyatakan bahwa penggunaan aplikasi digital untuk pencatatan transaksi, data hasil lelang, serta sistem pembayaran akan sangat membantu efisiensi dan transparansi.<sup>99</sup>

Nelayan juga menyambut baik ide ini, dengan harapan agar proses lelang lebih cepat, harga lebih transparan, dan hasil dapat dicatat secara otomatis. Salah satu informan bahkan mengatakan, “Ya, aplikasi digital untuk pencatatan dan transaksi akan sangat membantu.” Dengan demikian, keinginan untuk beradaptasi terhadap kemajuan teknologi menjadi potensi besar yang dapat mendukung penerapan pengelolaan TPI berbasis gampong di masa mendatang.<sup>100</sup>

<sup>96</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Suherman Selaku Geuchik Gampong, 06 Agustus 2025.

<sup>97</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Agusmuler Selaku ketua TPI Sekaligus Pengelola, 02 Agustus 2025

<sup>98</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Fahrurozi Amir selaku Dinas, 18 Agustus 2025.

<sup>99</sup>*Ibid.*

<sup>100</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Ansari, Faisal, Misbah Israr, Heru, dan Suhardi selaku Nelayan 13 Agustus 2025.

#### f. Peran Aktif Aparatur Gampong dalam Pengelolaan TPI

Berdasarkan hasil wawancara, peran aktif aparatur gampong menjadi salah satu faktor pendukung penting dalam penerapan pengelolaan pelelangan ikan berbasis gampong di TPI Gampong Lhok Bubon. Aparatur gampong tidak hanya berfungsi sebagai pengawas administratif, tetapi juga terlibat langsung dalam proses koordinasi antara nelayan, pengelola TPI, dan masyarakat.

Geuchik dan perangkat gampong secara rutin membantu memfasilitasi musyawarah apabila terjadi persoalan terkait harga ikan, pembagian tugas, maupun kebutuhan operasional TPI. Kehadiran aparatur gampong memberikan legitimasi sosial serta meningkatkan kepercayaan nelayan terhadap sistem pelelangan yang berjalan.

Beberapa informan nelayan juga menyampaikan bahwa keterlibatan aparatur gampong mempermudah penyelesaian konflik secara cepat melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Selain itu, perangkat gampong turut membantu dalam pengawasan kegiatan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas pelelangan. Dengan adanya peran aktif aparatur gampong, koordinasi antar pihak menjadi lebih terarah dan komunikasi berjalan lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan lokal dan dukungan kelembagaan di tingkat gampong merupakan faktor pendukung yang sangat dekat dengan praktik nyata pengelolaan TPI berbasis masyarakat.

## 2. Faktor Penghambat Pengelolaan TPI

### a. Keterbatasan Dana dan Fasilitas

Faktor penghambat utama dalam penerapan pengelolaan pelelangan ikan adalah keterbatasan dana dan fasilitas pendukung. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dana operasional yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk kebutuhan perawatan dan pengembangan TPI.

Geuchik mengakui bahwa pendanaan untuk perbaikan fasilitas, seperti alat timbang dan bangunan, masih terbatas sehingga beberapa program harus ditunda. Seorang nelayan juga menyatakan bahwa “Kalau soal dana, memang kurang. Kadang pengeluaran buat perbaikan alat atau beli timbangan baru nggak cukup, jadi harus mikir ulang.”<sup>101</sup>

Pengelola menambahkan bahwa kondisi ini menyebabkan banyak peralatan menjadi tidak efisien, karena belum menggunakan alat-alat modern seperti timbangan digital. Hal ini berdampak pada lambatnya proses pelelangan dan berkurangnya efisiensi kerja di lapangan.<sup>102</sup>

### b. Kurangnya Pemahaman dan Kemampuan Administratif

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola dan nelayan belum memiliki pemahaman yang cukup tentang manajemen administrasi dan sistem digital. Beberapa informan mengaku masih kesulitan dalam hal pencatatan transaksi, pengelolaan laporan keuangan, dan penggunaan teknologi baru.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup>*Ibid.*

<sup>102</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Agusmuler Selaku ketua TPI Sekaligus Pengelola, 02 Agustus 2025.

<sup>103</sup>*Ibid.*

Salah satu informan menyebutkan, “Banyak dari kita yang belum ngerti betul soal pengelolaan lelang digital atau administrasi yang rapi. Makanya kadang prosesnya lambat.” Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia ini menghambat efektivitas sistem pengelolaan dan menimbulkan ketergantungan pada pihak luar, terutama dalam hal administrasi dan pelaporan.<sup>104</sup>

#### c. Pengawasan yang Belum Optimal

Walaupun pengawasan internal telah berjalan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum berjalan secara optimal. Pengawas menyebutkan bahwa masih ada beberapa pelanggaran kecil yang tidak langsung diketahui karena minimnya tenaga pengawas dan tidak adanya regulasi tertulis yang kuat. Salah satu informan menyampaikan, “Pengawasan di sini masih belum optimal, jadi kadang ada yang nggak sesuai aturan, tapi nggak langsung ketahuan.” Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan masih memerlukan peningkatan, baik dari segi jumlah personel maupun sistem pelaporan yang lebih terstruktur.<sup>105</sup>

#### d. Ketidakstabilan Harga Ikan

Faktor penghambat berikutnya adalah fluktuasi harga ikan yang sulit diprediksi. Nelayan sering mengalami kerugian ketika harga ikan tiba-tiba turun saat hasil tangkapan sedang banyak. Seorang informan mengatakan, “Harga sering turun, jadi kadang kita nggak bisa prediksi berapa keuntungan yang bakal didapat. Sedih juga kalau udah capek-capek melaut.”

---

<sup>104</sup>*Ibid.*

<sup>105</sup>*Ibid.*

Kondisi ini memengaruhi semangat kerja nelayan serta membuat perencanaan keuangan menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan harga juga berdampak pada sistem pelelangan, karena penurunan harga menyebabkan hasil lelang berkurang.<sup>106</sup>

#### g. Kondisi Infrastruktur TPI

Selain masalah dana dan harga, kondisi infrastruktur TPI juga menjadi hambatan. Beberapa informan menyebutkan bahwa lokasi TPI kadang becek dan licin ketika hujan, sehingga mengganggu proses pelelangan. Salah satu nelayan mengatakan, “Lokasi TPI ini kadang becek, apalagi kalau habis hujan. Jadi pas bawa ikan atau lelang agak repot, licin gitu.”

Kondisi lingkungan seperti ini dapat mengganggu kegiatan operasional dan menurunkan kenyamanan bagi nelayan maupun pembeli. Dinas setempat menyadari hal ini dan menyebutkan bahwa perbaikan infrastruktur menjadi salah satu prioritas dalam program pengembangan TPI ke depan.<sup>107</sup>

#### f. Kurangnya Regulasi dan SOP yang Tegas

Faktor penghambat lainnya adalah minimnya regulasi dan SOP tertulis yang mengatur operasional TPI. Sebagian besar informan menyampaikan bahwa aturan yang berlaku masih bersifat lisan dan belum dituangkan dalam dokumen resmi.<sup>108</sup>

Seorang informan menyebutkan, “Kurang regulasi yang tegas bikin kita agak susah ambil keputusan. Kadang ada yang nggak patuh, tapi nggak bisa ditegur langsung.” Hal ini menyebabkan beberapa keputusan sulit dijalankan secara

---

<sup>106</sup>*Ibid.*

<sup>107</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Ansari, Faisal, Misbah Israr, Heru, dan Suhardi selaku Nelayan 13 Agustus 2025.

<sup>108</sup>*Ibid.*

konsisten dan membuka peluang terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas. Baik masyarakat maupun pengelola berharap adanya SOP dan peraturan tertulis agar pengelolaan lebih terarah dan transparan.<sup>109</sup>

Sebagai tindak lanjut dari berbagai kendala yang ditemukan, seluruh informan menyampaikan beberapa usulan solusi dan perbaikan, antara lain:

1. Pelatihan manajemen dan administrasi bagi pengelola dan nelayan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
2. Penyusunan SOP yang jelas dan regulasi tertulis agar pelaksanaan pengelolaan lebih terarah.
3. Peningkatan dukungan dana dan perbaikan fasilitas dari pemerintah gampong maupun instansi terkait.
4. Penerapan sistem digitalisasi lelang untuk mempercepat proses transaksi dan mempermudah pengawasan.

Pihak Dinas juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pelatihan dan bantuan sarana demi memperkuat sistem pengelolaan TPI berbasis gampong di Lhok Bubon.<sup>110</sup>

**Tabel 4.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan TPI**

No.	Aspek Faktor	Keterangan
<b>Pedukung</b>		
1.	Dukungan pengelola dan Dinas	Pengelola TPI dan Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung penerapan sistem digital karena dinilai dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pencatatan hasil lelang.
2.	Sikap terbuka nelayan terhadap teknologi	Nelayan menyambut baik rencana digitalisasi dengan harapan proses lelang lebih cepat, harga lebih transparan, dan hasil tercatat secara otomatis.

<sup>109</sup>*Ibid.*

<sup>110</sup>Hasil dari wawancara oleh Bapak Fahrurrozi Amir selaku Dinas, 18 Agustus 2025.

3.	Kebutuhan akan transparansi dan efisiensi	Sistem digital dipandang mampu mengurangi kesalahan pencatatan manual serta meminimalkan potensi kecurangan dalam transaksi lelang.
<b>Penghambat</b>		
1.	Keterbatasan pemahaman teknologi	Sebagian nelayan dan pengelola belum memahami penggunaan aplikasi atau sistem digital, sehingga masih bergantung pada pencatatan manual
2.	Belum tersedianya sistem dan aplikasi khusus	Hingga saat ini, TPI Gampong Lhok Bubon belum memiliki aplikasi atau sistem digital yang dapat digunakan untuk mendukung proses lelang.
3.	Keterbatasan sarana dan prasarana	Ketersediaan perangkat pendukung seperti komputer, jaringan internet, dan listrik yang stabil masih terbatas sehingga menghambat penerapan digitalisasi.

Berdasarkan hasil faktor pendukung yang telah dipaparka, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem digital dalam pengelolaan pelelangan ikan mendapatkan dukungan dari pengelola TPI dan Dinas Kelautan dan Perikanan karena dianggap mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Nelayan juga menyambut baik inisiatif ini dengan harapan proses lelang menjadi lebih cepat, harga lebih adil, dan pencatatan hasil secara otomatis. Selain itu, sistem digital dipandang efektif dalam mengurangi kesalahan pencatatan manual dan mencegah potensi kecurangan dalam transaksi lelang, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan keberlanjutan proses penjualan ikan.

Faktor penghambat dapat disimpulkan yaitu penerapan digitalisasi pada proses pelelangan ikan di TPI Gampong Lhok Bubon masih mengalami kendala yang cukup signifikan. Sebagian nelayan dan pengelola belum memahami penggunaan sistem digital, sehingga mereka masih bergantung pada pencatatan manual. Selain itu, ketiadaan aplikasi atau sistem digital resmi dari pihak pengelola juga menjadi hambatan utama. Faktor pendukung seperti perangkat komputer,

koneksi internet yang memadai, dan listrik yang stabil masih terbatas, sehingga menurunkan potensi penerapan teknologi digital secara efektif dan optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, faktor penghambat dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Lhok Bubon juga dapat dianalisis berdasarkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, maka dapat dilihat kendalanya sebagai berikut :

#### 1. Kendala pada Tahap Perencanaan (*Planning*)

Pada tahap perencanaan, kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan data pendukung dan perencanaan program yang belum tersusun secara sistematis. Sebagian besar rencana pengembangan TPI masih bersifat jangka pendek dan belum memiliki dokumen rencana strategis yang tertulis. Selain itu, keterbatasan dana menyebabkan beberapa rencana perbaikan fasilitas dan pengadaan alat harus ditunda. Ketidakstabilan harga ikan juga menyulitkan pengelola dalam merancang perencanaan ekonomi dan target pendapatan yang realistis.

#### 2. Kendala pada Tahap Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam aspek pengorganisasian, kendala yang muncul berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia serta pembagian tugas yang belum sepenuhnya jelas dan tertulis. Minimnya kemampuan administrasi dan manajemen menyebabkan pengelola masih bergantung pada beberapa individu tertentu. Selain itu, belum adanya struktur organisasi formal yang dilengkapi dengan SOP dan uraian tugas yang jelas membuat koordinasi kerja terkadang kurang optimal.

### 3. Kendala pada Tahap Pelaksanaan (*Actuating/Implementation*)

Pada tahap pelaksanaan, hambatan utama terlihat pada keterbatasan fasilitas, kondisi infrastruktur TPI yang kurang memadai, serta minimnya penggunaan peralatan modern. Infrastruktur yang becek dan licin saat hujan menghambat proses operasional pelelangan. Selain itu, keterbatasan dana operasional menyebabkan proses lelang berjalan kurang efisien. Fluktuasi harga ikan juga berdampak langsung pada motivasi kerja nelayan dan kelancaran aktivitas pelelangan sehari-hari.

### 4. Kendala pada Tahap Pengawasan (*Controlling*)

Dalam fungsi pengawasan, kendala yang ditemukan meliputi jumlah tenaga pengawas yang terbatas dan belum adanya sistem pelaporan yang terstruktur. Pengawasan yang masih bersifat sederhana dan belum didukung regulasi tertulis yang kuat menyebabkan beberapa pelanggaran kecil sulit terdeteksi secara cepat. Selain itu, belum adanya sistem monitoring berbasis administrasi atau teknologi membuat proses evaluasi kinerja pengelolaan belum berjalan secara maksimal.

## C. Pembahasan

### 1. Sistem Pengelolaan Pelelangan Ikan Berbasis Gampong di TPI Gampong Lhok Bubon dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan

Pembahasan mengenai sistem pengelolaan pelelangan ikan berbasis gampong di TPI Gampong Lhok Bubon dianalisis menggunakan teori manajemen George R. Terry (2009) yang meliputi fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat fungsi ini menjadi kerangka untuk melihat bagaimana

sistem pengelolaan TPI dijalankan serta kontribusinya terhadap kesejahteraan nelayan.

Penerapan keempat fungsi tersebut menjadi dasar dalam memahami bagaimana sistem pengelolaan pelelangan ikan di tingkat gampong dapat berjalan efektif, efisien, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat nelayan. Sistem pelelangan ikan yang dikelola secara baik harus mampu mengatur proses penjualan ikan secara transparan dan adil, memastikan harga yang optimal bagi nelayan serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Selain itu, sistem ini juga harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan, sehingga tercipta sinergi yang mendukung keberlangsungan usaha nelayan di gampong.

*Perencanaan (Planning)* dalam pengelolaan TPI Gampong Lhok Bubon masih dilakukan secara sederhana dan partisipatif. Aparatur gampong bersama pengelola dan perwakilan nelayan biasanya mengadakan musyawarah untuk menentukan jadwal pelelangan, pembagian tugas, dan penggunaan fasilitas. Praktik ini mencerminkan prinsip *bottom-up planning*, di mana masyarakat ikut berperan dalam menentukan arah kegiatan TPI. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa perencanaan belum didukung oleh dokumen tertulis seperti rencana kerja tahunan (RKT), rencana pengembangan TPI, atau anggaran berbasis program. Keputusan sering diambil secara spontan berdasarkan kebutuhan lapangan, terutama ketika muncul masalah teknis seperti perbaikan alat timbang atau kebutuhan operasional mendesak.

Hal ini menggambarkan bahwa fungsi perencanaan belum berjalan maksimal sesuai dengan teori Terry (2009) yang menekankan pentingnya penetapan tujuan dan strategi secara sistematis agar kegiatan dapat diarahkan dengan efektif. Keterbatasan dana menjadi kendala utama dalam tahap perencanaan. Berdasarkan hasil wawancara, dana operasional yang diperoleh dari retribusi dan bantuan gampong sering kali tidak mencukupi untuk membiayai perbaikan sarana, seperti timbangan digital, atap bangunan, atau peningkatan fasilitas pelelangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan TPI belum memiliki sistem penganggaran jangka panjang yang jelas, sebagaimana disarankan oleh Terry (2009) dalam aspek perencanaan keuangan dan strategi.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Rahman dan Pratiwi (2022) yang menyatakan bahwa sebagian besar TPI di wilayah pesisir Indonesia masih menghadapi kendala dalam perencanaan keuangan karena rendahnya kapasitas manajerial dan terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Dengan demikian, penguatan kapasitas perencanaan di tingkat gampong, penyusunan dokumen tertulis, serta pengintegrasian rencana kerja TPI ke dalam *Rencana Pembangunan Gampong* menjadi langkah penting agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berkelanjutan.

*Pengorganisasian (Organizing)* dalam pengelolaan TPI Gampong Lhok Bubon telah berjalan namun belum sepenuhnya formal. Struktur peran terbentuk secara alami antara aparatur gampong, pengelola TPI, dan masyarakat nelayan. Aparatur gampong bertindak sebagai pengawas umum, pengelola TPI menjalankan

kegiatan lelang, sementara nelayan menjadi pelaku utama dalam transaksi hasil tangkapan.

Salah satu informan menyebutkan bahwa meskipun tidak ada struktur organisasi tertulis, setiap orang sudah memahami tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi berbasis kepercayaan sosial (*social trust*) dan kebersamaan masyarakat pesisir. Namun, ketiadaan struktur formal menyebabkan pembagian tugas tidak terdokumentasi, sehingga ketika terjadi kendala teknis atau konflik, penyelesaiannya sering dilakukan melalui musyawarah tanpa prosedur yang baku.

Menurut Terry (2009), fungsi pengorganisasian bertujuan menciptakan struktur kerja yang efisien dengan mendistribusikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara jelas di antara anggota organisasi. Dalam konteks ini, TPI Gampong Lhok Bubon belum memiliki dokumen pembagian peran resmi, seperti penetapan petugas pelelangan, pencatat transaksi, dan pengawas operasional secara administratif.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Yuliana dan Natsir (2023) yang menemukan bahwa pengorganisasian di sejumlah TPI di Aceh masih bersifat informal dan belum memiliki mekanisme pengawasan struktural, sehingga koordinasi sering bergantung pada hubungan sosial dan keakraban antar pelaku. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pembentukan struktur organisasi formal dan penerapan *Standard Operating Procedure (SOP)* sangat diperlukan untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan transparansi, dan mengurangi potensi kesalahan operasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian TPI Gampong Lhok Bubon sudah berjalan dalam praktik sosial, namun perlu diperkuat melalui pembentukan struktur formal, sistem dokumentasi, dan pelatihan manajemen kelembagaan agar aktivitas pelelangan lebih efisien dan akuntabel.

*Pelaksanaan (Actuating)* merupakan tahap di mana seluruh rencana dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pelelangan di TPI Gampong Lhok Bubon dilakukan secara terbuka setiap kali nelayan selesai melaut. Proses dimulai dengan penimbangan hasil tangkapan, kemudian dilakukan lelang di area TPI dengan disaksikan masyarakat dan pembeli. Pengelola bertugas mencatat hasil transaksi dan memastikan pelelangan berjalan lancar.

Praktik ini menunjukkan bahwa semangat keterbukaan dan kejujuran masih menjadi nilai utama dalam sistem lelang di tingkat gampong. Hal ini sejalan dengan prinsip Terry (2009) yang menekankan bahwa pelaksanaan merupakan upaya menggerakkan seluruh anggota organisasi agar bekerja sesuai tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan bersama.

Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan fasilitas fisik, sistem pencatatan manual yang rawan kesalahan, serta minimnya penggunaan teknologi. Beberapa informan menyebutkan bahwa penerapan sistem digital atau aplikasi sederhana dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi.

Penelitian Sitorus et al. (2024) juga mendukung hal ini, di mana implementasi sistem informasi pelelangan berbasis digital di TPI Pekalongan

terbukti mampu mempercepat proses transaksi, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta meningkatkan kepercayaan nelayan terhadap pengelola. Berdasarkan perbandingan tersebut, pelaksanaan di TPI Gampong Lhok Bubon masih perlu diarahkan menuju penggunaan teknologi sederhana seperti *digital recording system* atau aplikasi pencatatan hasil lelang untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, semangat gotong royong masyarakat yang masih kuat menjadi faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan. Masyarakat setempat turut membantu menjaga kebersihan area pelelangan dan memperbaiki fasilitas secara swadaya. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengelolaan TPI tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis nilai sosial dan kebersamaan masyarakat pesisir.

*Pengawasan (Controlling)* pada TPI Gampong Lhok Bubon belum berjalan secara optimal. Pengawasan dilakukan secara informal oleh aparat gampong dan pengelola tanpa adanya mekanisme tertulis. Apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran, biasanya diselesaikan melalui musyawarah atau kesepakatan bersama.

Menurut Terry (2009), pengawasan merupakan proses penilaian dan koreksi terhadap pelaksanaan agar tetap sesuai dengan rencana. Tanpa sistem pengawasan yang jelas, pelaksanaan kegiatan berisiko mengalami penyimpangan dan inefisiensi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kendala utama dalam pengawasan adalah keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, dan belum adanya sistem pelaporan rutin.

Penelitian Nurhayati dan Wibowo (2023) juga menemukan bahwa sebagian besar TPI di daerah pesisir menghadapi permasalahan serupa, yaitu lemahnya

pengawasan karena belum adanya standar evaluasi kinerja dan laporan periodik. Padahal, fungsi pengawasan sangat penting dalam menjaga keadilan harga lelang, transparansi keuangan, serta kepercayaan antara nelayan dan pengelola.

Oleh karena itu, pengawasan di TPI Gampong Lhok Bubon perlu diperkuat melalui pembentukan tim pengawas tetap yang memiliki tanggung jawab dalam memantau kegiatan pelelangan, menyusun laporan evaluasi, serta menindaklanjuti keluhan nelayan. Selain itu, penerapan sistem digital audit sederhana dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan transparansi dan mencegah potensi penyimpangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry (2009) telah diterapkan dalam pengelolaan TPI Gampong Lhok Bubon, meskipun masih dalam bentuk sederhana dan tradisional. Nilai partisipasi masyarakat, gotong royong, dan kejujuran menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan keberlanjutan kegiatan pelelangan.

Namun, agar pengelolaan TPI lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, diperlukan penguatan pada aspek perencanaan yang terdokumentasi, pembentukan struktur organisasi formal, peningkatan fasilitas, serta penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi yang lebih transparan.

Langkah-langkah tersebut sejalan dengan rekomendasi penelitian Sitorus et al. (2024) dan Yuliana & Natsir (2023), yang menegaskan bahwa transformasi digital dan penguatan kelembagaan lokal merupakan kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan TPI yang profesional, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan nelayan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan fungsi-fungsi manajemen di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Lhok Bubon, dapat disimpulkan bahwa penerapan teori manajemen menurut George R. Terry (2009) yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah terlaksana, namun masih bersifat sederhana dan tradisional. Proses perencanaan dan pengawasan belum dijalankan secara formal dan terdokumentasi dengan baik, sementara aspek pengorganisasian dan pelaksanaan telah berjalan efektif berkat adanya partisipasi masyarakat dan semangat gotong royong yang tinggi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa teori manajemen modern dapat diimplementasikan dalam konteks lokal seperti TPI, meskipun dengan penyesuaian terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan sumber daya yang tersedia. Namun, agar pengelolaan TPI lebih optimal, dibutuhkan peningkatan kapasitas manajerial, penyusunan dokumen perencanaan dan pengawasan yang terstruktur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelelangan. Dengan demikian, penerapan fungsi manajemen di TPI Gampong Lhok Bubon dapat menjadi lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.

Berdasarkan hasil penelitian, pola perencanaan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Lhok Bubon dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan aparatur gampong, pengelola TPI, serta nelayan setempat. Proses perencanaan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, tetapi melalui musyawarah bersama untuk menyesuaikan kebutuhan lapangan dan kondisi ekonomi nelayan.

Adapun pola perencanaan yang diterapkan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

#### 1. Identifikasi Kebutuhan dan Permasalahan Lapangan

Tahap awal perencanaan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan operasional TPI serta permasalahan yang dihadapi nelayan dan pengelola. Identifikasi dilakukan melalui diskusi informal, musyawarah gampong, serta pengamatan langsung terhadap kondisi fasilitas, sistem pelelangan, dan aktivitas nelayan.

#### 2. Musyawarah dan Penetapan Prioritas Program

Setelah kebutuhan diidentifikasi, dilakukan musyawarah antara pemerintah gampong, pengelola TPI, dan perwakilan nelayan untuk menentukan program prioritas. Program yang direncanakan umumnya berkaitan dengan perbaikan fasilitas, penguatan sistem pelelangan, peningkatan transparansi harga, serta peningkatan kesejahteraan nelayan.

#### 3. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Pembagian Tugas

Tahap selanjutnya adalah menyusun rencana kegiatan secara sederhana yang meliputi jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, serta pembagian tugas antar pengelola. Pembagian peran dilakukan secara musyawarah berdasarkan kemampuan dan pengalaman masing-masing anggota.

#### 4. Penyesuaian dengan Ketersediaan Sumber Daya

Perencanaan disesuaikan dengan kondisi anggaran, fasilitas yang tersedia, serta kemampuan sumber daya manusia di tingkat gampong. Keterbatasan dana dan

sarana menjadi pertimbangan utama dalam menentukan skala prioritas pelaksanaan program.

#### 5. Evaluasi dan Perencanaan Ulang Secara Berkala

Pola perencanaan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan berdasarkan kondisi lapangan. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui pertemuan informal antara pengelola dan nelayan untuk menilai efektivitas program serta merencanakan kegiatan lanjutan.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Pengelolaan Pelelangan Ikan Berbasis Gampong di TPI Gampong Lhok Bubon**

Pembahasan faktor pendukung dan penghambat ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengenai kondisi-kondisi yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam penerapan pengelolaan pelelangan ikan berbasis gampong di TPI Gampong Lhok Bubon. Analisis dilakukan dengan merujuk pada hasil penelitian lapangan, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi penerapan pengelolaan pelelangan ikan berbasis gampong di TPI Gampong Lhok Bubon, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Pembahasan ini difokuskan pada faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pengelolaan pelelangan ikan berbasis gampong di TPI Gampong Lhok Bubon, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 4.6. Faktor-faktor tersebut terutama berkaitan dengan rencana penerapan sistem digital sebagai bagian dari upaya modernisasi pengelolaan TPI.

### **1. Faktor Pendukung Pengelolaan Pelelangan Ikan Berbasis Gampong**

#### a. Dukungan Pengelola dan Dinas

Berdasarkan hasil penelitian, dukungan dari pengelola TPI dan Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi faktor pendukung utama dalam rencana penerapan sistem digital pada pengelolaan pelelangan ikan. Pengelola TPI dan pihak Dinas menilai bahwa sistem digital mampu meningkatkan efisiensi kerja, transparansi transaksi, serta akuntabilitas pencatatan hasil lelang.

Dalam perspektif teori manajemen George R. Terry (2009), dukungan ini berkaitan dengan fungsi perencanaan (*planning*) dan pengorganisasian (*organizing*), di mana pimpinan dan pemangku kebijakan berperan dalam menentukan arah kebijakan serta menyediakan dukungan kelembagaan bagi perubahan sistem pengelolaan. Komitmen pengelola dan Dinas menunjukkan adanya kesiapan kelembagaan untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan TPI.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sitorus et al. (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan penerapan sistem digital di TPI sangat dipengaruhi oleh dukungan manajemen dan instansi pemerintah terkait. Tanpa dukungan tersebut, proses transformasi pengelolaan cenderung berjalan lambat dan tidak berkelanjutan. Penelitian Yuliana dan Natsir (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan TPI berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh solidaritas sosial dan keterlibatan warga lokal. Dengan demikian, rasa kebersamaan di Gampong Lhok Bubon menjadi kekuatan penting dalam menopang sistem pengelolaan berbasis gampong.

#### b. Sikap Terbuka Nelayan terhadap Teknologi

Faktor pendukung berikutnya adalah sikap terbuka nelayan terhadap penggunaan teknologi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa nelayan di Gampong

Lhok Bubon menyambut baik rencana digitalisasi sistem lelang, dengan harapan proses pelelangan menjadi lebih cepat, harga ikan lebih transparan, dan hasil lelang tercatat secara otomatis.

Dalam teori Terry (2009), kondisi ini berkaitan dengan fungsi pelaksanaan (*actuating*), yaitu kesediaan anggota organisasi untuk menjalankan kebijakan dan perubahan yang telah direncanakan. Sikap positif nelayan menunjukkan bahwa tidak terdapat resistensi sosial yang berarti terhadap inovasi teknologi, sehingga penerapan sistem digital memiliki peluang untuk berjalan dengan baik.

Penelitian Rahman dan Pratiwi (2022) juga menegaskan bahwa kekompakan kelompok nelayan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan TPI, terutama di wilayah yang menerapkan sistem berbasis komunitas. Oleh karena itu, kepedulian dan solidaritas antarnelayan menjadi faktor pendukung penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pengelolaan TPI. Penelitian Yuliana dan Natsir (2023) juga menemukan bahwa keterbukaan nelayan terhadap teknologi merupakan faktor penting dalam mendukung modernisasi pengelolaan pelelangan ikan. Dengan adanya sikap terbuka ini, proses adaptasi terhadap sistem baru dapat berlangsung lebih efektif.

#### c. Kebutuhan akan Transparansi dan Efisiensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan akan transparansi dan efisiensi menjadi alasan kuat bagi berbagai pihak untuk mendukung digitalisasi pengelolaan TPI. Sistem pencatatan manual dinilai rawan kesalahan dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan, sedangkan sistem digital dipandang mampu

meminimalkan kesalahan pencatatan serta mengurangi potensi kecurangan dalam transaksi lelang.

Dalam kerangka teori Terry (2009), pengawasan merupakan bagian dari fungsi *controlling*, yaitu memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan tujuan dan aturan yang telah disepakati. Walaupun belum didukung oleh mekanisme tertulis, pengawasan internal di TPI Gampong Lhok Bubon telah berperan sebagai kontrol sosial yang cukup efektif. Teori Terry (2009) juga menjelaskan kebutuhan akan transparansi dan efisiensi berkaitan dengan fungsi pengawasan (*controlling*), karena sistem digital memungkinkan proses pemantauan dan evaluasi berjalan lebih akurat dan terukur. Dengan data yang tercatat secara sistematis, pengawasan terhadap hasil lelang dan keuangan TPI dapat dilakukan dengan lebih baik

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurhayati dan Wibowo (2023) yang menyebutkan bahwa pengawasan informal di tingkat komunitas dapat menjadi penopang awal dalam sistem pengelolaan tradisional, meskipun tetap memerlukan penguatan melalui sistem formal.

## **2. Faktor Penghambat Pengelolaan Pelelangan Ikan Berbasis Gampong**

### **a. Keterbatasan Pemahaman Teknologi**

Berdasarkan Tabel 4.6, keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan sebagian nelayan dan pengelola menjadi faktor penghambat utama dalam penerapan sistem digital. Ketergantungan pada pencatatan manual menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, proses pencatatan hasil pelelangan ikan di TPI Gampong Lhok Bubon masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan sistem digital. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun kebijakan pengelolaan.

Pertama, keterbatasan pemahaman dan kemampuan teknologi menjadi alasan utama belum diterapkannya sistem digital. Sebagian besar pengelola dan nelayan belum terbiasa menggunakan aplikasi pencatatan berbasis digital sehingga masih merasa lebih nyaman menggunakan metode manual yang dianggap lebih mudah dan telah digunakan sejak lama. Salah satu informan menyampaikan bahwa penggunaan sistem digital dianggap rumit dan membutuhkan pelatihan khusus.

Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala penting. Hingga saat ini, TPI Gampong Lhok Bubon belum memiliki perangkat pendukung yang memadai seperti komputer, jaringan internet yang stabil, serta aplikasi pencatatan khusus yang dapat digunakan secara operasional. Kondisi ini menyebabkan pengelola tetap menggunakan buku pencatatan manual sebagai metode utama dalam proses administrasi lelang.

Ketiga, belum adanya kebijakan resmi atau regulasi tertulis yang mengatur penggunaan sistem digital dalam pengelolaan pelelangan ikan turut memengaruhi lambatnya penerapan teknologi. Proses pencatatan yang berjalan selama ini masih mengandalkan kebiasaan dan kesepakatan informal antar pengelola sehingga belum ada dorongan kuat untuk melakukan transformasi digital.

Keempat, keterbatasan dana operasional juga menjadi pertimbangan dalam penerapan sistem digital, karena penggunaan teknologi membutuhkan biaya tambahan untuk pengadaan perangkat, pelatihan sumber daya manusia, serta pemeliharaan sistem secara berkelanjutan. Dengan demikian, penggunaan pencatatan manual masih dipertahankan karena dianggap lebih praktis dalam kondisi saat ini, meskipun pengelola dan nelayan pada dasarnya memiliki sikap terbuka terhadap penerapan sistem digital di masa mendatang apabila tersedia dukungan sarana, pelatihan, serta kebijakan yang jelas.

Menurut Terry (2009), keterbatasan ini menghambat fungsi pelaksanaan (*actuating*), karena pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif tanpa kemampuan teknis yang memadai. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Rahman dan Pratiwi (2022) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi teknologi menjadi kendala utama dalam modernisasi pengelolaan TPI di daerah pesisir.

Keterbatasan dana dan fasilitas juga menjadi hambatan utama dalam pengelolaan TPI Gampong Lhok Bubon. Minimnya anggaran menyebabkan perbaikan fasilitas dan pengadaan alat modern sering tertunda.

Menurut Terry (2009), keterbatasan sumber daya akan menghambat fungsi planning, khususnya dalam perencanaan jangka panjang dan pengembangan organisasi. Penelitian Rahman dan Pratiwi (2022) juga menemukan bahwa masalah pendanaan merupakan kendala klasik dalam pengelolaan TPI di wilayah pesisir.

#### b. Belum Tersedianya Sistem dan Aplikasi Khusus

Faktor penghambat berikutnya adalah belum tersedianya sistem atau aplikasi digital khusus yang dapat digunakan untuk mendukung proses pelelangan

di TPI Gampong Lhok Bubon. Hingga saat ini, belum ada platform resmi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Dalam teori manajemen Terry (2009), ketiadaan sistem pendukung ini menunjukkan bahwa fungsi perencanaan (*planning*) belum sepenuhnya terimplementasi secara konkret. Tanpa sarana yang jelas, rencana digitalisasi sulit untuk diwujudkan dalam praktik.

Penelitian Sitorus et al. (2024) juga menekankan bahwa ketersediaan sistem informasi yang sesuai dengan konteks lokal merupakan prasyarat utama dalam penerapan pengelolaan pelelangan ikan berbasis digital.

### c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti komputer, jaringan internet, dan listrik yang stabil, turut menghambat penerapan sistem digital di TPI Gampong Lhok Bubon. Kondisi ini menyebabkan rencana digitalisasi belum dapat diimplementasikan secara optimal.

Dalam perspektif teori Terry (2009), keterbatasan sarana dan prasarana berdampak langsung pada fungsi pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*), karena kegiatan operasional tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan fasilitas yang memadai. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yuliana dan Natsir (2023) yang menyatakan bahwa infrastruktur teknologi merupakan faktor krusial dalam mendukung transformasi digital pengelolaan TPI, terutama di wilayah pesisir.

Berdasarkan hasil pembahasan yang merujuk pada Tabel 4.6, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengelolaan pelelangan ikan berbasis gampong di

TPI Gampong Lhok Bubon memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, khususnya melalui penerapan sistem digital sebagai bagian dari modernisasi pengelolaan. Faktor pendukung utama dalam pengelolaan TPI antara lain adalah adanya dukungan yang kuat dari pengelola TPI dan Dinas Kelautan dan Perikanan, sikap terbuka nelayan terhadap pemanfaatan teknologi, serta kebutuhan bersama akan transparansi dan efisiensi dalam proses pelelangan ikan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan George R. Terry (2009) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan organisasi sangat ditentukan oleh dukungan manajerial, keterlibatan pelaku, serta kesesuaian sistem kerja dengan kebutuhan organisasi.

Dukungan dari pengelola dan Dinas menunjukkan adanya komitmen kelembagaan dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan TPI. Komitmen ini menjadi modal penting dalam proses perubahan sistem, karena kebijakan dan arahan dari pihak pengelola serta instansi terkait sangat menentukan keberhasilan penerapan inovasi, termasuk digitalisasi sistem lelang (Yuliana & Natsir, 2023). Selain itu, keterbukaan nelayan terhadap teknologi mencerminkan kesiapan sosial masyarakat pesisir dalam menerima perubahan, sehingga potensi resistensi terhadap sistem baru relatif kecil. Kebutuhan akan transparansi dan efisiensi juga menjadi faktor pendorong yang kuat, mengingat sistem pencatatan manual selama ini dinilai kurang akurat, rentan terhadap kesalahan, serta berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dalam transaksi lelang, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Sitorus et al. (2024).

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian serius. Keterbatasan pemahaman

teknologi di kalangan sebagian nelayan dan pengelola menjadi kendala utama dalam pelaksanaan sistem digital. Rendahnya literasi teknologi menyebabkan proses pengelolaan masih bergantung pada cara-cara konvensional, sehingga manfaat digitalisasi belum dapat dirasakan secara optimal. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Rahman dan Pratiwi (2022) yang menyebutkan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam penerapan sistem digital pada TPI di wilayah pesisir.

Selain itu, belum tersedianya sistem dan aplikasi khusus yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal TPI Gampong Lhok Bubon turut menghambat implementasi kebijakan digitalisasi. Tanpa adanya platform yang jelas dan terstruktur, rencana penerapan sistem digital cenderung sulit diwujudkan dalam praktik. Padahal, menurut Terry (2009), keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada kejelasan sistem, prosedur kerja, dan sarana pendukung yang digunakan dalam organisasi.

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti ketersediaan perangkat komputer, jaringan internet, serta pasokan listrik yang stabil. Keterbatasan infrastruktur ini menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi tidak hanya membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, tetapi juga dukungan fasilitas fisik yang memadai. Kondisi serupa juga ditemukan oleh Yuliana dan Natsir (2023) yang menyatakan bahwa lemahnya infrastruktur teknologi informasi menjadi salah satu penghambat utama modernisasi pengelolaan TPI di daerah pesisir.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen, administrasi, dan literasi digital bagi pengelola dan nelayan menjadi kebutuhan mendesak, sebagaimana direkomendasikan oleh Rahman dan Pratiwi (2022). Selain itu, penyediaan sistem digital atau aplikasi pelelangan yang sederhana, mudah digunakan, dan sesuai dengan karakteristik lokal perlu diprioritaskan agar dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pihak. Perbaikan dan penguatan sarana serta prasarana pendukung, terutama infrastruktur teknologi informasi, juga menjadi syarat utama agar penerapan sistem digital dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Sitorus et al., 2024).

Dengan adanya dukungan kelembagaan, kesiapan sosial masyarakat, serta upaya peningkatan kapasitas dan infrastruktur secara berkelanjutan, pengelolaan pelelangan ikan berbasis gampong di TPI Gampong Lhok Bubon berpotensi berkembang menjadi sistem yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Kesimpulan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan TPI tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil sinergi antara dukungan kebijakan, partisipasi masyarakat, dan kesiapan sumber daya yang ada, sebagaimana ditegaskan dalam teori manajemen George R. Terry (2009).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan pelelangan ikan berbasis gampong di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Lhok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan pelelangan ikan di TPI Gampong Lhok Bubon telah dijalankan berdasarkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada aspek perencanaan, pemerintah gampong bersama pengurus TPI menerapkan pola perencanaan partisipatif melalui musyawarah dengan nelayan dan masyarakat pesisir untuk menentukan tujuan pengelolaan, yaitu meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui sistem lelang yang adil, transparan, dan efisien. Perencanaan yang dilakukan mencakup penetapan mekanisme harga lelang, pengaturan iuran operasional, serta upaya peningkatan sarana dan prasarana. Walaupun belum terdokumentasi secara formal dalam bentuk rencana kerja tertulis yang sistematis, proses perencanaan tersebut telah memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan kegiatan pelelangan. Pada aspek pengorganisasian, pengelolaan TPI melibatkan berbagai unsur, seperti pemerintah gampong, pengurus TPI, koperasi nelayan, serta masyarakat pesisir dengan pembagian tugas yang berjalan secara fungsional meskipun masih bersifat informal. Kerja sama antar pihak mampu mendukung kelancaran proses lelang serta mencegah

praktik monopoli harga. Pada aspek pelaksanaan, kegiatan pelelangan dilakukan secara terbuka setiap nelayan pulang melaut dengan melibatkan pembeli, pengurus, dan nelayan secara langsung. Sistem ini membuat harga ikan menjadi lebih kompetitif dan hasil lelang diterima langsung oleh nelayan tanpa perantara, sehingga meningkatkan transparansi serta pendapatan nelayan. Sementara itu, pada aspek pengawasan, pemerintah gampong dan pengurus TPI melakukan pemantauan rutin melalui musyawarah, laporan kegiatan, serta pengawasan langsung terhadap proses pelelangan. Meskipun pengawasan belum dilakukan melalui sistem audit formal, mekanisme pengawasan internal dinilai cukup efektif dalam menjaga keteraturan operasional. Secara keseluruhan, sistem pelelangan ikan berbasis gampong di TPI Gampong Lhok Bubon telah berjalan dengan baik melalui pendekatan partisipatif dan berbasis kearifan lokal, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan serta memperkuat solidaritas sosial masyarakat pesisir.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pengelolaan pelelangan ikan berbasis gampong di TPI Gampong Lhok Bubon memiliki peran penting terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan pelelangan. Faktor pendukung utama meliputi tingginya partisipasi nelayan dan masyarakat, dukungan pemerintah gampong, budaya gotong royong, kedekatan lokasi TPI dengan pemukiman nelayan yang memudahkan mobilitas operasional, serta pengalaman nelayan senior yang membantu menjaga stabilitas kegiatan pelelangan. Sistem pelelangan yang terbuka dan transparan juga meningkatkan kepercayaan antar

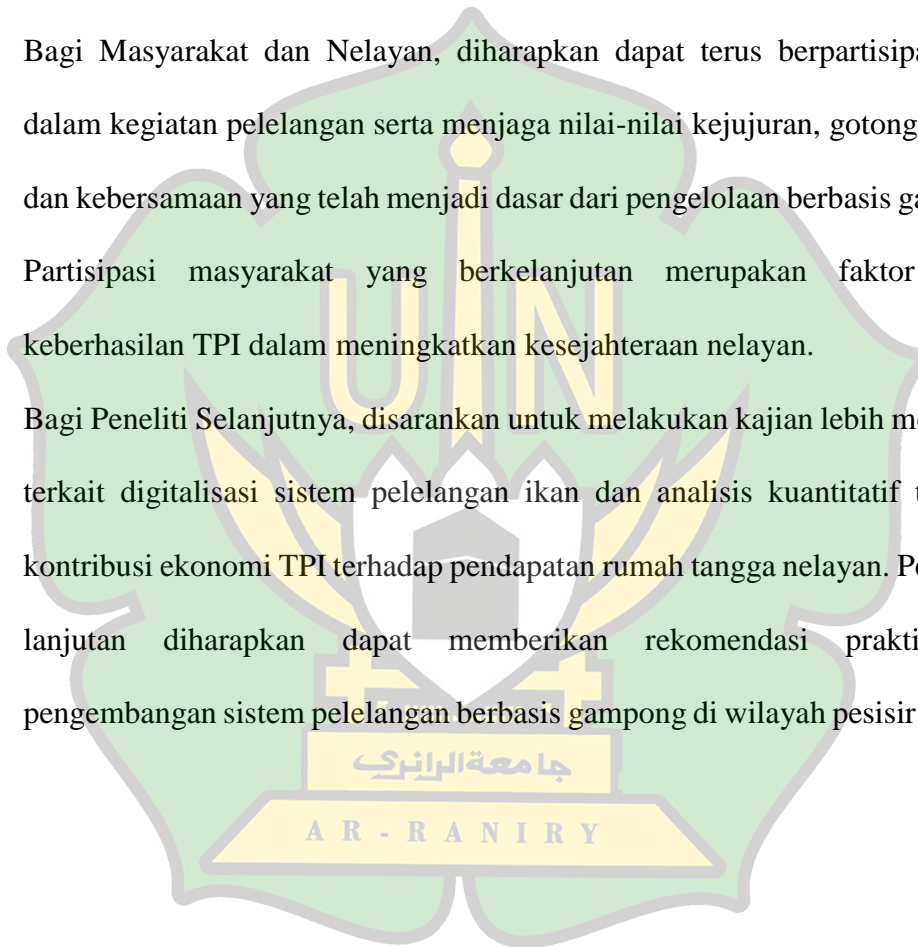
pelaku usaha perikanan. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana dan prasarana fisik, minimnya fasilitas penyimpanan ikan, keterbatasan dana operasional, serta kemampuan manajerial dan administratif pengurus yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, belum adanya regulasi tertulis dan standar operasional prosedur (SOP) menyebabkan sistem administrasi dan pencatatan masih dilakukan secara manual. Proses pencatatan belum menggunakan sistem digital disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan pengelola dan nelayan, belum tersedianya perangkat dan jaringan internet yang memadai, ketiadaan kebijakan resmi mengenai digitalisasi sistem lelang, serta keterbatasan anggaran untuk pengadaan dan pelatihan teknologi. Meskipun demikian, dengan dukungan sosial masyarakat dan semangat partisipatif yang tinggi, TPI Gampong Lhok Bubon tetap mampu beroperasi secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan setempat.

## **B. Saran**

1. Bagi Pengelola TPI Gampong Lhok Bubon, disarankan agar meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan melalui penyusunan dokumen rencana kerja, pembentukan struktur organisasi formal, dan penerapan sistem pencatatan keuangan yang lebih transparan. Pengurus juga perlu mengikuti pelatihan manajemen agar lebih terampil dalam mengelola kegiatan pelelangan.
2. Bagi Pemerintah Gampong dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, diharapkan dapat memberikan dukungan nyata berupa

peningkatan fasilitas pelelangan, penyediaan cold storage, serta penerapan sistem lelang berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi. Selain itu, penyusunan regulasi dan SOP khusus mengenai pengelolaan TPI berbasis gampong perlu dilakukan agar mekanisme kerja menjadi lebih terarah dan akuntabel.

3. Bagi Masyarakat dan Nelayan, diharapkan dapat terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelelangan serta menjaga nilai-nilai kejujuran, gotong royong, dan kebersamaan yang telah menjadi dasar dari pengelolaan berbasis gampong. Partisipasi masyarakat yang berkelanjutan merupakan faktor utama keberhasilan TPI dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait digitalisasi sistem pelelangan ikan dan analisis kuantitatif terhadap kontribusi ekonomi TPI terhadap pendapatan rumah tangga nelayan. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan sistem pelelangan berbasis gampong di wilayah pesisir lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A., Rizwan, R., & Aprilia, R. M. (2017). Tingkat efisiensi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan*, 2(3), 345–356.
- Amri, M., & Rahman, A. (2020). Pengelolaan pelelangan ikan berbasis masyarakat di Gampong Paya Basi, Aceh Besar. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*, 8(2), 145–158.
- Arikunto, S. (2019). *Manajemen penelitian*. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2023). *Statistik perikanan Provinsi Aceh 2023*. BPS Provinsi Aceh.
- Budi Santoso, M. A. (2023). Model pengelolaan pelelangan ikan berbasis gampong untuk peningkatan pendapatan nelayan. *Al Ijtimaayah*, 14(1), 78-95.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. (2023). *Laporan tahunan pengelolaan perikanan tangkap Kabupaten Aceh Barat*. DKP Aceh Barat.
- Febryanto, F., Sam'un, M., & Azzahra, F. (2024). Efektivitas penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Jawa Barat. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 14(1), 1–15.
- Fitri, H. K., Suherman, A., & Boesono, H. (2020). Strategi pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tawang Kabupaten Kendal Jawa Tengah. *Jurnal Perikanan Tangkap*, 4(2), 89–101.
- Imron, M. (2003). *Kemiskinan dalam masyarakat nelayan*. Pustaka Pelajar.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023*. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- Rasyidah, M.Ag Dkk. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Budidaya Tiram Gampong Tiban Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. *Al-Ijtimaayah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(2)2018,70-71.

- Nurhayati, S., & Wibowo, A. (2023). Pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan tempat pelelangan ikan di daerah pesisir. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 8(2), 101–114.
- Nurhaliza. (2022). *Sistem pelelangan ikan dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir Aceh* (Skripsi). Universitas Syiah Kuala.
- Nugroho, R. (2018). *Manajemen publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Nisa, K. (2020). *Peran kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terhadap penjualan nelayan (Studi kasus: Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai)* (Skripsi). Universitas Sumatera Utara.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rahman, A., & Pratiwi, D. (2022). Pengelolaan tempat pelelangan ikan dan tantangan perencanaan keuangan di wilayah pesisir Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 17(2), 145–158.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Saragih, J. R. (2017). *Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan peningkatan kesejahteraan nelayan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sadadang, Y. S., Lengkong, F. D. J., & Tampongangoy, D. L. (2020). Manajemen Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Tumumpa Dua Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(95), 1–9.
- Syamsu. (2016). *Dasar-dasar manajemen*. Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2019). *Manajemen sumber daya perikanan berbasis masyarakat*. Prenadamedia Group.

- Sitorus, R., Hidayat, A., & Lestari, N. (2024). Implementasi sistem informasi pelelangan ikan berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi. *Jurnal Manajemen Perikanan Indonesia*, 9(1), 55–68.
- Terry, G. R. (2009). *Principles of management*. Richard D. Irwin.
- Wizan, S. (2021). *Analisis peran Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dalam perspektif ekonomi Islam (Studi pada masyarakat Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Wahid, A. (2023). *Manajemen Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pemasaran hasil perikanan*. Deepublish.
- Yuliana, Y., & Natsir, M. (2023). Pengelolaan tempat pelelangan ikan berbasis masyarakat di wilayah pesisir Aceh. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, 5(1), 23–36.



## Lampiran

### Lampiran 1. SK (Surat Keterangan) Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: B 293/Un.08/FDK/Kp.00.4/03/2025  
Tentang  
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen,  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional,  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen,  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh,  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry,  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry,  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry,  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry,  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry,  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama Menunjuk Sdr. 1) Dr. Rasyidah, M.Ag. Sebagai Pembimbing UTAMA  
2) Manni Kristina Situmeang, M. Sos., MA. Sebagai Pembimbing KEDUA

Untuk membimbing KKU Skripsi:  
Nama : M. Al Kausar  
NIM/Jurusan : 210404001/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)  
Judul : Pengelolaan Pelelangan Ikan Berbasis Gampong (Studi Pada TPI di Gampong Lhok Bubon Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat)

Kedua Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Ketiga Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

Keempat Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh  
Pada Tanggal: 03 Maret 2025 M  
03 Ramadhan 1446 H

AR - RANIRY

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dekan  
  
Kusmawati Hatta

Tembusan  
1. Rektor UIN Ar-Raniry,  
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry,  
3. Pembimbing Skripsi  
4. Mahasiswa yang bersangkutan  
5. Arsip

Keterangan  
SK berlaku sampai dengan tanggal 03 Maret 2025 M

## Lampiran 2. SK (Surat Keterangan) Izin Penelitian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B.1393/Un.08/FDK.I/PP.00.9/06/2025  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat; keuchik gampong lhokbubon kecamatan sama samatiga kabupaten aceh barat  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 200404029  
Nama : M. AL KAUTSAR  
Program Studi/Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
Alamat : JL. LUENG ANEUK AYE

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENGELOLAAN PELELANGAN IKAN BERBASIS GAMPONG STUDI PADA TPI DI GAMPONG LHOKBUBON, KECAMATAN SAMATIGA, KABUPATEN ACEH BARAT**

Banda Aceh, 11 Juni 2025  
An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Mahmuddin, M.Si.  
NIP. 197210201997031002

Berlaku sampai : 31 Juli 2025

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

Lampiran 3. SK (Surat Keterangan) melakukan penelitian Dinas Perikanan Dan Kelautan (DKP).

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
 Jalan Swadaya, Nomor 148 Johan Pahlawan, Meulaboh, Aceh Barat Kode Pos 23617  
 Laman dkp.acehbaratkab.go.id, Pos-el dkkpkab.acehbarat@gmail.com

Meulaboh, 23 Juli 2025  
 Meulaboh, 28 Muharram 2025

Nomor : 500.5/1132  
 Sifat : -  
 Lampiran : -  
 Hal : **Pelaksanaan Penelitian**

Yth. : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 di  
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry perihal penelitian ilmiah mahasiswa.


2. Terkait hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : M. Al Kautsar  
 NIM : 200404029  
 Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam  
 Alamat : Jl. Lueng Aneuk Aye

Benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat dengan judul 'Pengelolaan Pelelangan Ikan Berbasis Gampong Studi pada TPI di Gampong Lhok Bubon, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat'.

3. Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
 Kabupaten Aceh Barat




**Mulvadi, S.Hut., M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP.19690801 199803 1 005

**AR - R A N I R Y**

جامعة الرانيري

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 4. SK (Surat Keterangan) Melakukan Penelitian Dari Gampong Lhok Bubon

 **PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT**  
**KECAMATAN SAMATIGA**  
**GAMPONG LHOK BUBON**  
Sekretariat : Jl. Gampong Cot – Lhok Bubon  
Email : [Lhokbubon21@gmail.com](mailto:Lhokbubon21@gmail.com) Tlp/HP : 085261595158

---


**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
NOMOR : 270/46/VI/2025

Dasar : Menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: B.963/Un.08/FDK.I/PP.00.9/04/2025 Tanggal 23 Juni 2025  
Hal. Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka dengan ini menerangkan bahwa nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : M. AL KAUTSAR  
Nim : 200404029  
Prodi/Semester : Pengembangan Masyarakat Islam  
Judul Skripsi : Pengelolaan Pelelangan Ikan Berbasis Gampong Studi pada TPI di Gampong Lhok Bubon, Kec. Samatiga Kab. Aceh Barat

Untuk : Telah selesai Melakukan penelitian dalam rangka Penyelesaian Skripsi di Gampong Lhok Bubon, Pengelolaan Pelelangan Ikan Berbasis Gampong Studi pada TPI di Gampong Lhok Bubon, Kec. Samatiga Kab. Aceh Barat, dari Tanggal 23 s/d 26 Juni 2025  
Demikian Surat Keterangan ini kami Sampaikan untuk di Pergunakan sebagaimana mestinya.

Lhok Bubon, 26 Juni 2025  
Kecamatan Gampong Lhok Bubon

  
**SUHERMAN**

## INSTRUMEN WAWANCARA

### Sistem Pengelolaan Pelelangan Ikan Berbasis Gampong

#### a. Informan Utama (Pengelola/Pemerintah Gampong/Tokoh Nelayan)

1. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pengelolaan tersebut?
2. Apa tujuan utama dari perencanaan pengelolaan?
3. Bagaimana proses perencanaan itu dilakukan?
4. Apa saja tantangan utama dalam perencanaan pengelolaan ikan?
5. Apakah nelayan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan TPI?
6. Apakah ada struktur organisasi pengelolaan TPI?
7. Bagaimana struktur organisasi pengelolaan TPI yang ada?
8. Apa bentuk peran dan tanggung jawab yang diberikan?
9. Sejauh mana pemerintah gampong terlibat dalam pengelolaan TPI?
10. Bagaimana tahapan penyusunan rencana pengelolaan yang dilakukan?
11. Apakah ada hambatan atau kesulitan selama pelelangan berlangsung?
12. Bagaimana pelaksanaan mekanisme pelelangan ikan dilakukan setiap hari?
13. Apakah penggunaan teknologi membantu mempercepat transaksi lelang?
14. Bagaimana desa mengevaluasi jalannya aktivitas pelelangan ikan?
15. Bagaimana pengelola menanggapi keluhan atau masukan dari nelayan?

#### b. Informan Pendukung (DKP/Pemerintah Daerah)

1. Apa rencana strategi dalam pengembangan dan pengelolaan TPI?

2. Bagaimana menetapkan regulasi dan harga ikan di TPI?
3. Bagaimana DKP menjalin koordinasi dengan pengelola dan pemerintah daerah?
4. Bagaimana pelaksanaan program bantuan atau dukungan fasilitas dari DKP?
5. Bagaimana DKP memantau aktivitas dan kinerja TPI?
6. Bagaimana pendapat Anda tentang perencanaan pengelolaan TPI saat ini?
7. Apakah ada peran masyarakat dalam organisasi atau pengelolaan?
8. Apakah masyarakat melihat sistem lelang berjalan dengan baik dan transparan?

### **Strategi Pengelolaan TPI untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan**

#### **a. Informan Utama (Nelayan)**

1. Apa saja kendala utama dalam hal infrastruktur dan fasilitas?
2. Sejauh mana infrastruktur mendukung kelancaran proses lelang?
3. Fasilitas apa yang paling dibutuhkan?
4. Bagaimana sistem diatur agar terhindar dari manipulasi harga?
5. Apakah proses lelang cepat atau lambat?

#### **b. Informan Pendukung (Pemerintah/Organisasi)**

1. Strategi memastikan fasilitas TPI higienis?
2. Program peningkatan infrastruktur TPI?
3. Apa yang perlu diperbaiki dalam mekanisme lelang?
4. Apakah ada lembaga yang mewakili nelayan?
5. Pendapat tentang tata kelola TPI saat ini?

**DOKUMENTASI**

Gambar 1.  
Dokumentasi Balai Desa Gampong Lhok Bubon  
Sumber : Peneliti, 2025



Gambar 2.  
Dokumentasi Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  
Sumber : Peneliti, 2025



Gambar 3.  
Dokumentasi Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  
Sumber : Peneliti, 2025



Gambar 4.  
Dokumentasi Proses Timbang Ikan di TPI  
Sumber : Peneliti, 2025



Gambar 5.



Gambar 6.

Dokumentasi Wawancara Peneliti Bersama Informan  
Sumber : Peneliti, 2025



Gambar 7.

Dokumentasi Wawancara Peneliti Bersama Informan  
Sumber : Peneliti, 2025



Gambar 8.  
Dokumentasi Wawancara Peneliti Bersama Informan  
Sumber : Peneliti, 2025



Gambar 8.  
Dinas Kelautan Kabupaten Aceh Barat  
Sumber : Peneliti, 2025



Gambar 8.

Wawancara Peneliti Bersama Informan Dinas Kelautan Kabupaten Aceh Barat  
Sumber : Peneliti, 2025



Gambar 9.

Sarana Prasarana TPI  
Sumber : Peneliti, 2025